



**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**

# **RENCANA STRATEGIS**



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH**

**TAHUN 2025 - 2026**



## KATA PENGANTAR

Rencana strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tahun 2025 – 2026 merupakan perencanaan taktis strategis yang akan dicapai dalam kurun waktu dua tahun dalam upaya mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026.

Dalam Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menggambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk menunjang pembangunan daerah Kabupaten Mempawah. Proses analisis strategis yang dilakukan dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini diharapkan dapat di implementasikan dan di aplikasikan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah tahun 2025 – 2026.

Semoga dengan adanya Rencana Strategis ini dapat meningkatkan kinerja aparatur pelaksanaan pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.

Mempawah, 28 Februari 2024



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

Dra. JKNAWATI, M.Si  
Pembina Utama Muda

NIP. 19720510 199203 2 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i  
DAFTAR ISI ii  
DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN ..... 1  
1.1. Latar Belakang ..... 1  
1.2. Landasan Hukum ..... 2  
1.3. Maksud dan Tujuan ..... 6  
1.4. Sistematika Penulisan ..... 7

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH ..... 8  
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ..... 8  
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah ..... 25  
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ..... 29  
2.4. Kelompok Sasaran Layanan..... 31

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 32  
3.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah ..... 32  
3.2. Isu-Isu Strategis ..... 35

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN ..... 40  
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..... 40  
4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah ..... 42

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ..... 43

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .... 45

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..... 46

BAB VIII. PENUTUP ..... 48

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN DAN TABEL

2.1 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Mempawah ..... 9

2.2 PNS BPKAD Berdasarkan Golongan ..... 11

2.3 PNS BPKAD Berdasarkan Eselon ..... 11

2.4 PNS BPKAD Berdasarkan Golongan Tingkat Pendidikan ..... 12

2.5 Sarana dan Prasarana BPKAD ..... 12

2.6 Pencapaian Kinerja BPKAD (2020-2024) ..... ...

2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKAD (2020-2024) ... ...

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah ... ...

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan ..... ...

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah ..... ...

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada  
Tujuan dan Sasaan RPD ..... ...

---

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Berlakunya Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mencakup landasan hukum di bidang Perencanaan Pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam Undang-undang ini ditetapkan bahwa sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, maka Daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut adalah bahwa Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang baik tercermin dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 menjadi Peraturan Daerah, maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah selaku salah satu Badan Daerah Kabupaten Mempawah yang terbentuk atas pengembangan fungsi Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (RENSTRA). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan dan mengawal arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal regional, nasional, maupun global.

Rencana strategis yang disusun oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (*strenghts*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan tantangan (*threats*) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi.

## **1.2 Landasan Hukum Penyusunan**

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025–2026 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

---

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka 6 Menengah Daerah, Serta Tata Cara perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klsifikasi, Kodefikasi dan Nomenkaltur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Kalsifikasi, Kodefikaksi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5);
23. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah;
24. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2024 Nomor 6);

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2025-2026 yaitu menyediakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu-isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026.

Tujuan dari penyusunan Renstra BPKAD Tahun 2025-2026 yaitu menyediakan tolak ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja BPKAD serta sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah.

## **1.4 Sistematika Penulisan.**

Rencana Strategis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan

**BAB III    PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Isu Strategis

**BAB IV    TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V     STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI    RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII   KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII  PENUTUP**

**LAMPIRAN**

---

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah merupakan Badan Daerah yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang pengelola keuangan dan aset daerah Kabupaten Mempawah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

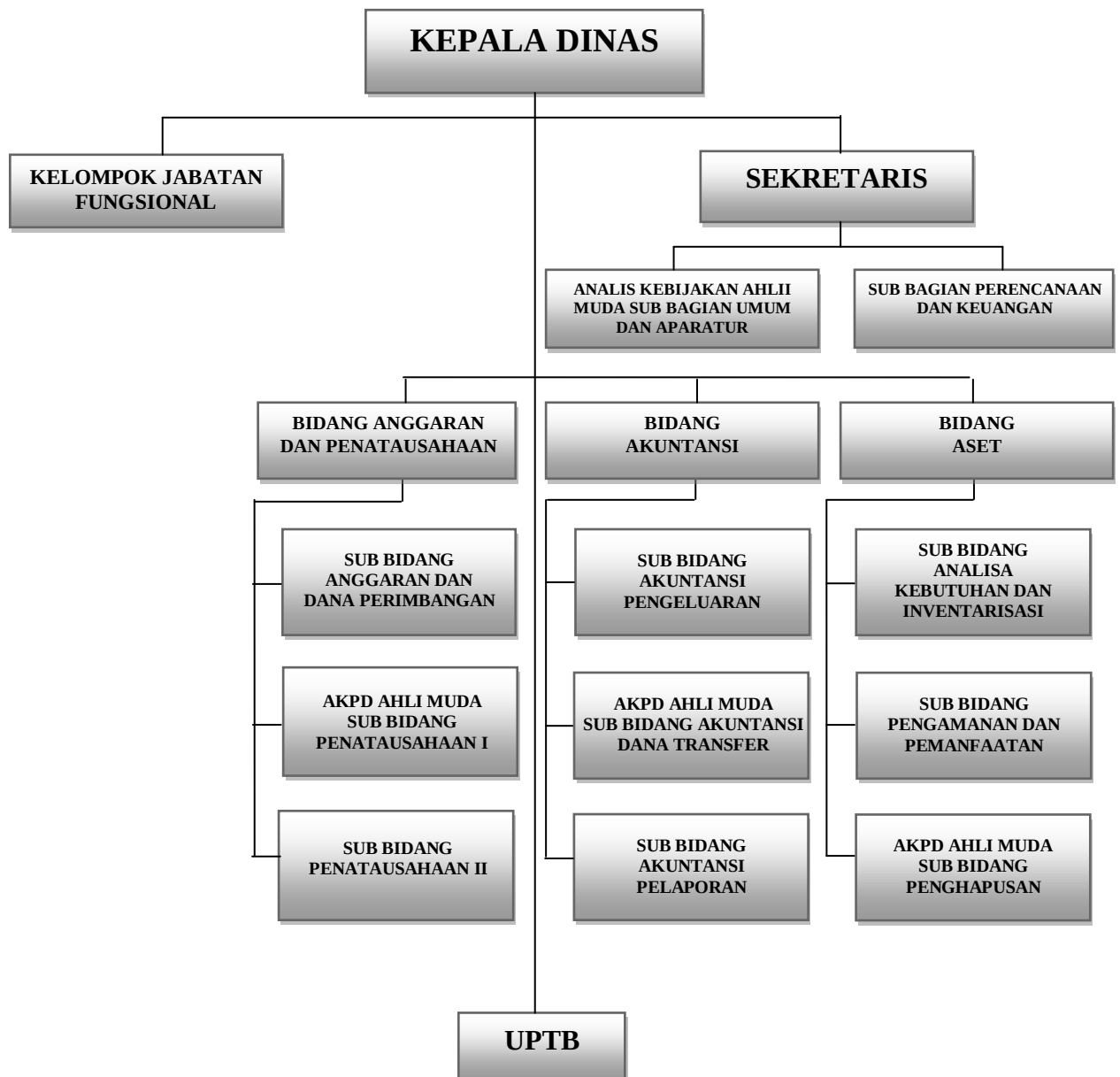
Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari :
  - a. Analis Kebijakan Ahli Muda Sub Bagian Umum dan Aparatur;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Anggaran dan Penatausahaan, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
  - b. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Bidang Penatausahaan I;
  - c. Sub Bidang Penatausahaan II;

4. Bidang Akuntansi, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
  - b. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Bidang Akuntansi Dana Transfer;
  - c. Sub Bidang Akuntansi Pelaporan;
5. Bidang Aset, membawahi 3 (tiga) Sub Bidang yang terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
  - b. Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
  - c. Analis Kebijakan Pusat dan Daerah Ahli Muda Sub Bidang Penghapusan;
6. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
7. Kelompok Jabatan Fungsional;

## Bagan 2.1

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH



## 2.2 Uraian Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang Keuangan dan Aset;
  - b. Perumusan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
  - c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Keuangan dan Aset;
  - d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Keuangan dan Aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang Keuangan dan Aset;
  - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Keuangan dan Aset;
  - g. Pelaksanaan administrasi badan di bidang Keuangan dan Aset;
  - h. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan; dan
  - i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Bupati di bidang Keuangan dan Aset sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan.
1. Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan, serta bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan serta pengelolaan pelayanan publik;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, perencanaan dan keuangan di lingkungan Badan;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Badan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- g. fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- h. pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Badan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian meliputi :

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan pengelolaan perencanaan dan administrasi keuangan badan, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :
  - a) Penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - b) Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas Badan;
  - c) Penyiapan dan pengolahan bahan penyusunan rencana anggaran;
  - d) Pelaksanaan penatausahaan keuangan Badan;

- e) Penyiapan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
- f) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- h) Penyiapan bahan fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
- i) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan;
- j) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- k) pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan keuangan;
- l) Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diberikan oleh Sekretaris. Bagian Kelima Bidang Anggaran dan Penatausahaan.

## 2. Bidang Anggaran dan Penatausahaan

Bidang Anggaran dan Penatausahaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Anggaran dan Penatausahaan, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan

pelayanan dan administrasi di bidang Anggaran dan Penatausahaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran dan Penatausahaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Anggaran dan Penatausahaan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah di Bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;

- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Penatausahaan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Anggaran dan Penatausahaan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Anggaran dan Penatausahaan membawahi 2 (dua) Sub Bidang meliputi :

- 1) Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- 2) Sub Bidang Penatausahaan.

Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang anggaran dan penatausahaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Anggaran dan Dana Perimbangan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program kerja bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan.
- c) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- d) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana anggaran daerah;

- e) Pelaksanaan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
- f) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- g) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan; h. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- h) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan;
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang Anggaran dan Dana Perimbangan yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan.

Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Penatausahaan II sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Penatausahaan II menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program kerja bidang Penatausahaan II;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Penatausahaan II;
- c) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Penatausahaan II;

- d) Pelaksanaan koordinasi dan pengelolaan perbendaharaan daerah
- e. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Penatausahaan II;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Penatausahaan II;
- f) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Penatausahaan II;
- g) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Penatausahaan II;
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang Penatausahaan II yang diberikan oleh Kepala Bidang Anggaran dan Penatausahaan.

### 3. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Akuntansi, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Akuntansi. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kerja Bidang Akuntansi;
- b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Akuntansi;

- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Akuntansi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah di Bidang Akuntansi;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Badan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Akuntansi sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Akuntansi membawahi 2 (dua) Sub Bidang meliputi :

- 1) Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran;
- 2) Sub Bidang Akuntansi Pelaporan.

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Akuntansi sesuai

dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program kerja bidang Akuntansi Pengeluaran;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- c) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- d) Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan Akuntansi Pengeluaran;
- e) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- g) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- h) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Akuntansi Pengeluaran;
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang Akuntansi Pengeluaran yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

Sub Bidang Akuntansi Pelaporan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Akuntansi Pelaporan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Akuntansi Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program kerja bidang Akuntansi Pelaporan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Akuntansi Pelaporan;
- c) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Akuntansi Pelaporan;
- d) Penyelenggaraan koordinasi dan pelaksanaan akuntansi pelaporan keuangan daerah;
- e) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pelaporan;
- f) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Akuntansi Pelaporan;
- g) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Akuntansi Pelaporan;
- h) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Akuntansi Pelaporan;
- i) Pelaksanaan tugas lain di bidang Akuntansi Pelaporan yang diberikan oleh Kepala Bidang Akuntansi.

#### 4. Bidang Aset

Bidang Aset mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang Aset, serta bertanggung jawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Aset. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Aset menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja bidang Aset;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Aset;
- c. Penyiapan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan di bidang Aset;
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Aset sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Penyelenggaraan program pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aset;
- g. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Aset;
- h. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aset sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Aset;
- j. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Aset;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan di bidang Aset sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Bidang Aset membawahi 2 (dua) Sub Bidang meliputi :

- 1) Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi;
- 2) Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan.

Sub Bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang Aset sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program kerja bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- c) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- d) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- f) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- g) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi;
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang Analis Kebutuhan dan Inventarisasi yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset.

Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan mempunyai tugas pengumpulan dan pengolahan bahan kebijakan di bidang

Pengamanan dan Pemanfaatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pengamanan dan Pemanfaatan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyusunan program kerja bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- b) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- c) Penyiapan bahan fasilitasi dan koordinasi di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- d) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- e) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- f) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- g) Penyusunan bahan evaluasi, pengendalian dan pelaporan di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan;
- h) Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengamanan dan Pemanfaatan yang diberikan oleh Kepala Bidang Aset.

#### 5. Unit Pelaksana Teknis

Unit Pelaksana Teknis dapat dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang Badan.

#### 6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan, melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.

## **2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah**

### **1. Sumber Daya manusia**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah, merupakan unsur penunjang Daerah di Bidang Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pada saat ini Aparatur Sipil Negara yang ditempatkan di BPKAD Kabupaten Mempawah berjumlah 44 (empat puluh empat) Orang dengan latar belakang pendidikan yang cukup beragam namun sebagian besar adalah Sarjana Ekonomi Jurusan Keuangan dan Akuntansi untuk mendukung kinerja Bidang Aset Daerah ditempatkan pula ASN yang memang telah memiliki keahlian khusus di bidang Manajemen Aset. Sistem Kerja di BPKAD menuntut pekerjaan dilakukan dengan cepat dan dengan ketepatan yang tinggi, karena Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah memiliki tugas dan fungsi yang cukup penting sehingga dokumen-dokumen perencanaan dan hasil rencana serta dokumen penunjang lainnya harus dibuat dengan se-detail mungkin guna menghasilkan kebijakan yang tepat dalam hal pengelolaan keuangan dan juga pengelolaan aset daerah. Berikut gambaran formasi Aparatur Sipil

Negara di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten

Mempawah yang dapat terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Data PNS BPKAD Kabupaten Mempawah  
Berdasarkan Pangkat/Gol Ruang

| NO           | STATUS/JENIS<br>KELAMIN |           | GOL II |   |   |   | GOL III |   |    |    | GOL IV |   |   |   | JUM<br>LAH |
|--------------|-------------------------|-----------|--------|---|---|---|---------|---|----|----|--------|---|---|---|------------|
|              |                         |           | a      | b | c | d | a       | b | c  | D  | a      | b | c | d |            |
| 1            | PNS                     | LAKI-LAKI | 0      | 0 | 2 | 3 | 6       | 1 | 6  | 8  | 1      | 1 | 0 | 0 | 28         |
|              |                         | PEREMPUAN | 0      | 0 | 0 | 0 | 3       | 3 | 4  | 4  | 1      | 0 | 1 | 0 | 16         |
| JUMLAH PNS   |                         |           | 0      | 0 | 2 | 3 | 9       | 4 | 10 | 12 | 2      | 1 | 1 | 0 | 44         |
|              | CPNS                    | LAKI-LAKI | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          |
|              |                         | PEREMPUAN | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          |
| JUMLAH CPNS  |                         |           | 0      | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0  | 0  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0          |
| JUMLAH TOTAL |                         |           | 0      | 0 | 2 | 3 | 9       | 4 | 10 | 12 | 2      | 1 | 1 | 0 | 44         |

Sumber : Data DUK Tahun 2024

Tabel 2.3

Data PNS BPKAD Kabupaten Mempawah  
Berdasarkan Eselon

| No           | Eselon/Non Eselon | Golongan |    |     |    | JUMLAH |
|--------------|-------------------|----------|----|-----|----|--------|
|              |                   | I        | II | III | IV |        |
| 1            | Eselon II         | -        | -  | -   | 1  | 1      |
| 2            | Eselon III        | -        | -  | -   | 4  | 4      |
| 3            | Eselon IV         | -        | -  | 7   | -  | 7      |
| Sub Jumlah   |                   | -        | -  | 7   | 5  | 12     |
| 4            | Non Eselon        | -        | 5  | 27  | -  | 32     |
| Sub Jumlah   |                   | -        | 5  | 27  | -  | 32     |
| Jumlah Total |                   | -        | 5  | 34  | 5  | 44     |

Sumber : Data DUK Tahun 2024

Tabel 2.4

Data PNS BPKAD Kabupaten Mempawah  
Berdasarkan Jenjang Pendidikan

| No     | Jenjang Pendidikan | Jumlah |
|--------|--------------------|--------|
| 1.     | S 2                | 8      |
| 2.     | S 1                | 20     |
| 3.     | D 3                | 4      |
| 4.     | D 1                | 0      |
| 5.     | SMA                | 12     |
| 6.     | SMP                | 0      |
| Jumlah |                    | 44     |

**Sumber : Data DUK Tahun 2024**

Upaya peningkatan pelayanan dan profesionalisme aparatur akan terus dilakukan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Mempawah.

## 2. Sarana dan Prasarana

Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah terus dilakukan untuk mendukung kelancaran dan optimalnya pelayanan baik secara internal maupun eksternal kepada masyarakat.

Untuk lebih lengkapnya sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.5**  
**Data Sarana dan Prasarana BPKAD**

| No | Nama Barang                       | Jumlah | Satuan | Keadaan |
|----|-----------------------------------|--------|--------|---------|
| 1  | Tanah                             | 21     | Persil | Baik    |
| 2  | Pompa Air                         | 2      | Unit   | Baik    |
| 3  | Mesin Ginset                      | 1      | Unit   | Baik    |
| 4  | Kendaraan Roda 4                  | 7      | Unit   | Baik    |
| 5  | Kendaraan Roda 2                  | 16     | Unit   | Baik    |
| 6  | Lemari Besi/Metal                 | 6      | Buah   | Baik    |
| 7  | Rak Besi                          | 5      | Buah   | Baik    |
| 8  | Brand Kas                         | 6      | Buah   | Baik    |
| 9  | Lemari Kaca                       | 1      | Buah   | Baik    |
| 10 | Mesin Absensi                     | 1      | Buah   | Baik    |
| 11 | Meja Kerja Pejabat Eselon II      | 1      | Buah   | Baik    |
| 12 | Meja Rapat Pejabat Eselon II      | 7      | Buah   | Baik    |
| 13 | Meja Rapat Pejabat Eselon III     | 1      | Buah   | Baik    |
| 14 | Lemari Kayu                       | 16     | Buah   | Baik    |
| 15 | Meja Rapat                        | 31     | Buah   | Baik    |
| 16 | Meja Bundar                       | 6      | Buah   | Baik    |
| 17 | Meja Makan Besi                   | 1      | Buah   | Baik    |
| 18 | Kursi Tamu                        | 2      | Set    | Baik    |
| 19 | Kursi Kerja Pejabat Eselon III    | 1      | Buah   | Baik    |
| 20 | Kursi Putar                       | 3      | Buah   | Baik    |
| 21 | Karpet                            | 4      | Buah   | Baik    |
| 22 | Kursi Kerja Pejabat Eselon II     | 2      | Buah   | Baik    |
| 23 | Mesin Pel/Poles                   | 1      | Buah   | Baik    |
| 24 | Mesin Pemotong Rumput             | 1      | Buah   | Baik    |
| 25 | A.C. Split                        | 13     | Buah   | Baik    |
| 26 | A.C. Window                       | 5      | Unit   | Baik    |
| 27 | Exhause Fan                       | 1      | Buah   | Baik    |
| 28 | Lemari Es                         | 1      | Buah   | Baik    |
| 29 | Televisi                          | 1      | Unit   | Baik    |
| 30 | Tangga Aluminium                  | 2      | Buah   | Baik    |
| 31 | Rice Cooker (Alat Dapur)          | 5      | Buah   | Baik    |
| 32 | Alat Dapur lainnya                | 5      | Buah   | Baik    |
| 33 | Mainframe (Komputer Jaringan)     | 6      | Buah   | Baik    |
| 34 | Komputer Jaringan lainnya         | 1      | Buah   | Baik    |
| 35 | P.C Unit                          | 37     | Unit   | Baik    |
| 36 | Lap Top                           | 16     | Unit   | Baik    |
| 37 | Note Book                         | 1      | Unit   | Baik    |
| 38 | Personal Komputer lainnya         | 1      | Unit   | Baik    |
| 39 | CPU (Peralatan Mini Komputer)     | 4      | Unit   | Baik    |
| 40 | CPU (Peralatan Personal Komputer) | 4      | Unit   | Baik    |

| No     | Nama Barang                                         | Jumlah | Satuan | Keadaan |
|--------|-----------------------------------------------------|--------|--------|---------|
| 41     | Monitor                                             | 4      | Unit   | Baik    |
| 42     | Printer (Peralatan Personal Komputer)               | 44     | Unit   | Baik    |
| 43     | Peralatan Personal Komputer lainnya                 | 13     | Unit   | Baik    |
| 44     | LCD Projector/Infocus                               | 3      | Unit   | Baik    |
| 45     | Camera Electronic                                   | 1      | Unit   | Baik    |
| 46     | Amplifier                                           | 1      | Unit   | Baik    |
| 47     | Facsimile                                           | 1      | Buah   | Baik    |
| 48     | Mesin Fotocopy Folio                                | 1      | Buah   | Baik    |
| 49     | Mic Conference                                      | 2      | Unit   | Baik    |
| 50     | alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst) | 1      | Unit   | Baik    |
| 51     | Tenda                                               | 2      | Buah   | Baik    |
| 52     | Papan Nama Instansi                                 | 1      | Buah   | Baik    |
| 53     | Papan Pengumuman                                    | 4      | Buah   | Baik    |
| 54     | Alat Kantor Lainnya                                 | 53     | Buah   | Baik    |
| 55     | Unit Power Supply                                   | 7      | Unit   | Baik    |
| 56     | Alat Rumah Tangga Lain-lain                         | 4      | Buah   | Baik    |
| 57     | Layar Film/Projector                                | 2      | Buah   | Baik    |
| 58     | alat komunikasi sosial lainnya (dst)                | 2      | Unit   | Baik    |
| 59     | Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain            | 1      | Unit   | Baik    |
| 60     | Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Lain-lain          | 1      | Buah   | Baik    |
| 61     | Bak Penyimpanan/Tower Air Baku                      | 1      | Buah   | Baik    |
| 62     | Jalan Khusus Lainnya                                | 1      | Buah   | Baik    |
| 63     | Buku Peraturan Perundang-Undangan                   | 285    | Buah   | Baik    |
| Jumlah |                                                     | 681    |        |         |

**Sumber : Data Inventarisasi Aset Tahun 2023**

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan BPKAD Kabupaten Mempawah yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya yaitu unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pengelolaan keuangan dan asset daerah.

Dalam pembangunan suatu daerah, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bertujuan untuk menyelaraskan

kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelerasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning), dengan penganggaran (budgeting) antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah. Kinerja keuangan Kabupaten Mempawah ditampilkan untuk menjelaskan kinerja keuangan periode tahun 2020–2024. Lebih lanjut Pencapaian Kinerja Pelayanan serta Anggaran dan Realisasi Pendanaan periode sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel. 2.6**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Mempawah**

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                         | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan   | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                           |                |               |          | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| 1                                                                                                                         | 2              | 3             | 4        | 5                                    | 6          | 7          | 8          | 9          | 10                           | 11         | 12         | 13         | 14         | 15                       | 16         | 17         | 18         | 19         |
| Opini BPK terhadap laporan Keuangan                                                                                       |                |               | Predikat | WTP                                  | WTP        | WTP        | WTP        | WTP        | WTP                          | WTP        | WTP        | WTP        |            | WTP                      | WTP        | WTP        | WTP        |            |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006                                                                                                 |                |               |          |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Tingkat Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                            |                |               | %        |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Tersusunnya Buku Analisa Standar Belanja                                                                                |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya Raperda tentang APBD                                                                                        |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD                                                             |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya Raperda tentang Perubahan APBD                                                                              |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                   |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| - Meningkatnya pemahaman aparatur pengelolaan keuangan terhadap implementasi SIMDA                                        |                |               | %        | 70                                   |            |            |            |            | 70                           |            |            |            |            | 70                       |            |            |            |            |
| - Ketepatan dalam penerbitan SP2D : UP/LS/GU/UP                                                                           |                |               | Hari     | 2                                    |            |            |            |            | 2                            |            |            |            |            | 2                        |            |            |            |            |
| - Kelancaran Pencairan dana                                                                                               |                |               | %        | 100                                  |            |            |            |            | 100                          |            |            |            |            | 100                      |            |            |            |            |
| - Ketersediaan Aplikasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) yang Lancar dan Terintegrasi (Online System)             |                |               | %        | 100                                  |            |            |            |            | 100                          |            |            |            |            | 100                      |            |            |            |            |
| - Tingkat kelancaran pelaksanaan pengelolaan Bantuan Keuangan (Hibah, Bansos, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga) |                |               | %        | 100                                  |            |            |            |            | 100                          |            |            |            |            | 100                      |            |            |            |            |
| - Meningkatnya Pemahaman aparatur pengelolaan keuangan tentang Pengelolaan Keuangan daerah                                |                |               | OPD      | 30                                   |            |            |            |            | 30                           |            |            |            |            | 30                       |            |            |            |            |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019                                                                                                 |                |               |          |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan       |                |               | %        |                                      | 100        | 100        | 100        | 100        |                              | 100        | 100        | 100        |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran                                                                  |                |               | %        |                                      | 98         | 98         | 98         | 98         |                              | 98         | 98         | 98         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang tersusun                                                                               |                |               | Dokumen  |                                      | 2          | 2          | 2          | 2          |                              | 2          | 2          | 2          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang tersusun                                                                     |                |               | Dokumen  |                                      | 2          | 2          | 2          | 2          |                              | 2          | 2          | 2          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen verifikasi RKA-SKPD yang tersusun                                                                        |                |               | Dokumen  |                                      | 31         | 31         | 31         | 31         |                              | 31         | 31         | 31         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen verifikasi perubahan RKA-SKPD yang tersusun                                                              |                |               | Dokumen  |                                      | 31         | 31         | 31         | 31         |                              | 31         | 31         | 31         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen verifikasi DPA-SKPD yang tersusun                                                                        |                |               | Dokumen  |                                      | 31         | 31         | 31         | 31         |                              | 31         | 31         | 31         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |

[illegible]

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                          | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan   | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                            |                |               |          | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| - Tersusunnya Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD                                                         |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD                              |                |               | Dokumen  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| <b>Kualitas Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan</b>                                                               |                |               | %        |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Ketersediaan kelengkapan data reduksi Penyusunan RKA                                                                     |                |               | %        | 100                                  |            |            |            |            | 100                          |            |            |            |            | 100                      |            |            |            |            |
| - Ketersediaan Pedoman dlm Penetapan Perda/Perbup ttg APBD                                                                 |                |               |          |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Kesesuaian penyusunan Anggaran dengan Petunjuk Teknis/Pedoman                                                            |                |               |          |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Kesesuaian Penyusunan Laporan Keuangan dengan SAP                                                                        |                |               | %        | 80 %                                 |            |            |            |            | 80 %                         |            |            |            |            | 80 %                     |            |            |            |            |
| - Tersedianya laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tepat waktu                                                        |                |               | Bulan    | Maret dan Juli                       |            |            |            |            | Maret dan Juli               |            |            |            |            | Maret dan Juli           |            |            |            |            |
| - Opini BPK terhadap laporan keuangan Pemda Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)                                                 |                |               | Predikat | WTP                                  |            |            |            |            | WTP                          |            |            |            |            | WTP                      |            |            |            |            |
| - Meningkatnya kemampuan dan keterampilan pengelola keuangan menyusun laporan pertanggungjawaban pendapatan dan belanja    |                |               | %        | 100                                  |            |            |            |            | 100                          |            |            |            |            | 100                      |            |            |            |            |
| - Terlaksananya rekonsiliasi laporan bulanan dan realisasi pendapatan daerah                                               |                |               | Dokumen  | 6                                    |            |            |            |            | 6                            |            |            |            |            | 6                        |            |            |            |            |
| - Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP                                                                        |                |               | Dokumen  | 36                                   |            |            |            |            | 36                           |            |            |            |            | 36                       |            |            |            |            |
| - Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP                                                                        |                |               | %        | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| - Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP                                                                        |                |               | %        | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| - Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP                                                                        |                |               | %        | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| - Meningkatnya pemahaman aparatur pengelolaan keuangan Daerah                                                              |                |               | %        | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| - Kesesuaian penyusunan laporan keuangan dengan SAP                                                                        |                |               | %        | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| <b>PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019</b>                                                                                           |                |               |          |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| <b>Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan</b> |                |               |          |                                      | 100        | 100        | 100        | 100        |                              | 100        | 100        | 100        |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - <b>Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen laporan keuangan daerah</b>                                             |                |               |          |                                      | 90         | 90         | 90         | 90         |                              | 90         | 90         | 90         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Dokumen berita acara Rekon Kas Penerimaan dan Rekon Kas Pengeluaran                                                      |                |               |          |                                      | N/A        | 124        | 124        | 124        |                              | N/A        | 124        | 124        |            |                          | N/A        | 100        | 100        |            |
| - Dokumen Rekonsiliasi Pendapatan Transfer, Belanja dan Pembiayaan                                                         |                |               |          |                                      | 15         | 15         | 15         | 15         |                              | 15         | 15         | 15         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Dokumen Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran yang tersusun                     |                |               |          |                                      | N/A        | 2          | 2          | 2          |                              | N/A        | 2          | 2          |            |                          | N/A        | 100        | 100        |            |
| - Dokumen Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                               |                |               |          |                                      | 2          | 2          | 2          | 2          |                              | 2          | 2          | 2          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |

[illegible]

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                                                               | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan  | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                                                                 |                |               |         | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan                                                                              |                |               |         |                                      | 100        | 100        | 100        | 100        |                              | 100        | 100        | 100        |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan |                |               |         |                                      | 95         | 100        | 100        | 100        |                              | 95         | 100        | 100        |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen standar satuan harga yang tersusun                                                                                                             |                |               |         |                                      | 70         | 70         | 70         | 70         |                              | 70         | 70         | 70         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                          |                |               |         |                                      | N/A        | 70         | 70         | 70         |                              | N/A        | 70         | 70         |            |                          | N/A        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen RKBMD dan RKPMD yang tersusun                                                                                                                  |                |               |         |                                      | 70         | 70         | 70         | 70         |                              | 70         | 70         | 70         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Peraturan/Kebijakan tentang Pengelolaan BMD yang diterbitkan                                                                                   |                |               |         |                                      | 5          | 5          | 5          | 5          |                              | 5          | 5          | 5          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen daftar barang milik daerah yang tersusun                                                                                                       |                |               |         |                                      | 15         | 15         | 15         | 15         |                              | 15         | 15         | 15         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Dokumen hasil sensus atas BMD                                                                                                                                 |                |               |         |                                      | N/A        | 1          | 1          | 1          |                              | N/A        | 1          | 1          |            |                          | N/A        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Pengamanan Fisik dan rekonsiliasi Sertifikat Tanah yang tersusun                                                                               |                |               |         |                                      | 3          | 3          | 3          | 3          |                              | 3          | 3          | 3          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Hasil Penilaian BMD yang tersusun                                                                                                              |                |               |         |                                      | 5          | 7          | 9          | 12         |                              | 5          | 7          | 9          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen hasil pemindahtanganan BMD yang tersusun                                                                                                       |                |               |         |                                      | 5          | 5          | 5          | 5          |                              | 5          | 5          | 5          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan BMD yang tersusun                                                        |                |               |         |                                      | 20         | 18         | 20         | 22         |                              | 20         | 18         | 20         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen kontrol atas pergerakan BMD yang tersusun                                                                                                      |                |               |         |                                      | 35         | 35         | 35         | 35         |                              | 35         | 35         | 35         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Dokumen Laporan Barang Milik Daerah yang tersusun                                                                                                             |                |               |         |                                      | 20         | 20         | 20         | 20         |                              | 20         | 20         | 20         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Sosialisasi dan pembinaan dalam rangka meningkatkan SDM untuk tertib administrasi BMD                                                                         |                |               |         |                                      | 70         | 70         | 70         | 70         |                              | 70         | 70         | 70         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| Nilai SAKIP                                                                                                                                                     |                |               |         | 50                                   | 60         | 70         | 75         | 75         | 50                           | 60         | 70         | 75         |            | 50                       | 60         | 70         | 75         |            |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006                                                                                                                                       |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan                                                                                                |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Tersusunnya laporan Capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD                                                                                                |                |               | Dokumen | 2                                    |            |            |            |            | 2                            |            |            |            |            | 2                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya laporan dokumen perencanaan SKPD                                                                                                                  |                |               | Dokumen | 3                                    |            |            |            |            | 3                            |            |            |            |            | 3                        |            |            |            |            |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019                                                                                                                                       |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran                                                                                                         |                |               |         |                                      | 90         | 90         | 90         | 90         |                              | 90         | 90         | 90         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase ketepatan waktu penyelesaian dokumen perencanaan                                                                                                   |                |               | Dokumen |                                      | 98         | 98         | 98         | 98         |                              | 98         | 98         | 98         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |

| INDIKATOR KINERJA                                                                          | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan  | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                            |                |               |         | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| - Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun                                |                |               | Dokumen |                                      | 2          | 2          | 2          | 2          |                              | 2          | 2          | 2          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersusun                                                    |                |               | Dokumen |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun                                          |                |               | Dokumen |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun                                                    |                |               | Dokumen |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun                                          |                |               | Dokumen |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun |                |               | Dokumen |                                      | 3          | 3          | 3          | 3          |                              | 3          | 3          | 3          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006                                                                  |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| Terwujudnya akuntabilitas pelaporan capaian kinerja dan keuangan                           |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Tersusunnya laporan Semesteran SKPD                                                      |                |               | Dokumen | 2                                    |            |            |            |            | 2                            |            |            |            |            | 2                        |            |            |            |            |
| - Tersusunnya laporan akhir tahun SKPD                                                     |                |               | Dokumen | 2                                    |            |            |            |            | 2                            |            |            |            |            | 2                        |            |            |            |            |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019                                                                  |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran                                    |                |               |         |                                      | 90         | 90         | 90         | 90         |                              | 90         | 90         | 90         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase ketepatan waktu pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah            |                |               |         |                                      | 95         | 95         | 95         | 95         |                              | 95         | 95         | 95         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan                                        |                |               | %       |                                      | 100        | 100        | 100        | 100        |                              | 100        | 100        | 100        |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang tersusun        |                |               | Dokumen |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                         |                |               | Dokumen |                                      | 2          | 2          | 2          | 2          |                              | 2          | 2          | 2          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD                         |                |               | Dokumen |                                      | 2          | 2          | 2          | 2          |                              | 2          | 2          | 2          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006                                                                  |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| Persentase Tingkat Disiplin Aparatur                                                       |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Tersedianya pakaian dinas dan perlengkapannya                                            |                |               | stell   | 61                                   |            |            |            |            | 61                           |            |            |            |            | 61                       |            |            |            |            |
| Meningkatnya kapasitas sumberdaya aparatur                                                 |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Prosentase PNS yang mengikuti sosialisasi /diklat                                        |                |               | %       | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019                                                                  |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran                                    |                |               | %       |                                      | 90         | 90         | 90         | 90         |                              | 90         | 90         | 90         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah              |                |               | %       |                                      | 90         | 90         | 90         | 90         |                              | 90         | 90         | 90         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah pakaian dinas beserta atributnya                                                  |                |               | stell   | 51                                   | 51         | 51         | 51         | 51         | 51                           | 51         | 51         | 51         |            | 100                      | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah ASN yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                       |                |               | orang   | 5                                    | 7          | 7          | 7          | 7          | 5                            | 7          | 7          | 7          |            | 100                      | 100        | 100        | 100        |            |

| INDIKATOR KINERJA                                                            | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan  | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                              |                |               |         | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006                                                    |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran                      |                |               | %       |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Jumlah surat yang terkirim                                                 |                |               | surat   | 250                                  |            |            |            |            | 250                          |            |            |            |            | 250                      |            |            |            |            |
| - Tersedianya layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik           |                |               | dokumen | 36                                   |            |            |            |            | 36                           |            |            |            |            | 36                       |            |            |            |            |
| - Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops            |                |               | Unit    | 18                                   |            |            |            |            | 18                           |            |            |            |            | 18                       |            |            |            |            |
| - Tersedianya jasa adminitrasi keuangan                                      |                |               | lembar  | 1200                                 |            |            |            |            | 1200                         |            |            |            |            | 1200                     |            |            |            |            |
| - Tersedianya Jasa Kebersihan kantor                                         |                |               | orang   | 4                                    |            |            |            |            | 4                            |            |            |            |            | 4                        |            |            |            |            |
| - Jumlah alat tulis kantor yang disediakan                                   |                |               | Jenis   | 20                                   |            |            |            |            | 20                           |            |            |            |            | 20                       |            |            |            |            |
| - Jumlah barang yang dicetak                                                 |                |               | Jenis   | 10                                   |            |            |            |            | 10                           |            |            |            |            | 10                       |            |            |            |            |
| - Jumlah barang yang digandakan                                              |                |               | lembar  | 140.000                              |            |            |            |            | 140.000                      |            |            |            |            | 140.000                  |            |            |            |            |
| - Jumlah komponen listrik kantor                                             |                |               | Jenis   | 6                                    |            |            |            |            | 6                            |            |            |            |            | 6                        |            |            |            |            |
| - Jumlah Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                                 |                |               | ekspl   | 1.000                                |            |            |            |            | 1.000                        |            |            |            |            | 1.000                    |            |            |            |            |
| - Jumlah Makanan dan Minuman                                                 |                |               | ktk     | 2.861                                |            |            |            |            | 2.861                        |            |            |            |            | 2.861                    |            |            |            |            |
| - Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah                 |                |               | %       | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| - Jumlah Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah                |                |               | %       | 80                                   |            |            |            |            | 80                           |            |            |            |            | 80                       |            |            |            |            |
| - Jumlah Jasa Pendukung keamanan dan ketertiban /pengamanan kantor           |                |               | orang   | 2                                    |            |            |            |            | 2                            |            |            |            |            | 2                        |            |            |            |            |
| Persentase penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah                 |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Jumlah arsip daerah yang tertata dengan benar                              |                |               | arsip   | 1500                                 |            |            |            |            | 1500                         |            |            |            |            | 1500                     |            |            |            |            |
| Pameran informasi dan media massa yang terlaksana                            |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Terlaksananya pameran informasi pelayanan publik                           |                |               | kali    | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019                                                    |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| - Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran                      |                |               |         |                                      | 90         | 90         | 90         | 90         |                              | 90         | 90         | 90         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi umum perangkat daerah       |                |               |         |                                      | 80         | 80         | 80         | 80         |                              | 80         | 80         | 80         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia |                |               | paket   |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia                     |                |               | paket   |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan                               |                |               | paket   |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia                        |                |               | paket   |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah bahan/material yang disediakan                                      |                |               | paket   |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |

| INDIKATOR KINERJA                                                                                            | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan  | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                              |                |               |         | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| - Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dalam satu tahun                                               |                |               | kali    |                                      | 7          | 7          | 7          | 7          |                              | 7          | 7          | 7          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - jumlah arsip dinamis SKPD yang tertata dengan benar                                                        |                |               | arsip   |                                      | 1580       | 4300       | 4400       | 4500       |                              | 1580       | 4300       | 4400       |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| <b>- Persentase kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dapat terpenuhi</b>                 |                |               |         |                                      | <b>80</b>  | <b>85</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |                              | <b>80</b>  | <b>85</b>  | <b>90</b>  |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah surat yang terkirim                                                                                 |                |               | surat   |                                      | 50         | 50         | 50         | 50         |                              | 50         | 50         | 50         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah dokumen jasa komunikasi, sumber daya air dan telepon yang terselesaikan                             |                |               | Dokumen |                                      | 36         | 36         | 36         | 36         |                              | 36         | 36         | 36         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang tersedia                                                            |                |               | orang   |                                      | 5          | 5          | 5          | 5          |                              | 5          | 5          | 5          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| <b>PERMENDAGRI 13 TAHUN 2006</b>                                                                             |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| <b>- Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Perkantoran</b>                                               |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| Tersedianya kendaraan dinas/oparasional                                                                      |                |               | unit    | -                                    |            |            |            |            | -                            |            |            |            |            | -                        |            |            |            |            |
| Tersedianya perlengkapan gedung/kantor                                                                       |                |               | paket   | -                                    |            |            |            |            | -                            |            |            |            |            | -                        |            |            |            |            |
| Tersedianya meubelair kantor                                                                                 |                |               | paket   | -                                    |            |            |            |            | -                            |            |            |            |            | -                        |            |            |            |            |
| Tersedianya komputer kantor                                                                                  |                |               | paket   | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| Tersedianya Instalasi listrik dan telepon                                                                    |                |               | paket   | -                                    |            |            |            |            | -                            |            |            |            |            | -                        |            |            |            |            |
| Terpeliharanya Gedung Kantor                                                                                 |                |               | gedung  | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| Terpeliharanya Mobil Jabatan                                                                                 |                |               | unit    | 1                                    |            |            |            |            | 1                            |            |            |            |            | 1                        |            |            |            |            |
| Terpeliharanya kendaraan Dinas/Operasional                                                                   |                |               | unit    | 17                                   |            |            |            |            | 17                           |            |            |            |            | 17                       |            |            |            |            |
| Terpeliharanya Perlengkapan Gedung Kantor                                                                    |                |               | jenis   | 2                                    |            |            |            |            | 2                            |            |            |            |            | 2                        |            |            |            |            |
| Terpeliharanya Komputer kantor                                                                               |                |               | unit    | 56                                   |            |            |            |            | 56                           |            |            |            |            | 56                       |            |            |            |            |
| Terehabnya kendaraan dinas/operasional                                                                       |                |               |         | -                                    |            |            |            |            | -                            |            |            |            |            | -                        |            |            |            |            |
| <b>PERMENDAGRI 90 TAHUN 2019</b>                                                                             |                |               |         |                                      |            |            |            |            |                              |            |            |            |            |                          |            |            |            |            |
| <b>Persentase capaian pelayanan administrasi perkantoran</b>                                                 |                |               |         |                                      | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |                              | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| <b>- Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor</b>                                          |                |               |         |                                      | <b>95</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>  |                              | <b>95</b>  | <b>95</b>  | <b>95</b>  |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan                                             |                |               | Unit    |                                      | N/A        | 3          | 2          | 2          |                              | N/A        | 3          | 2          |            |                          | N/A        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah alat penyimpanan yang diadakan                                                                      |                |               | paket   |                                      | N/A        | 1          | N/A        | N/A        |                              | N/A        | 1          | N/A        |            |                          | N/A        | 100        | N/A        |            |
| - Jumlah Meubelair yang diadakan                                                                             |                |               | paket   |                                      | N/A        | 1          | N/A        | N/A        |                              | N/A        | 1          | N/A        |            |                          | N/A        | 100        | N/A        |            |
| - Jumlah komputer kantor yang diadakan                                                                       |                |               | unit    |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| <b>- Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>                |                |               |         |                                      | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |                              | <b>90</b>  | <b>90</b>  | <b>90</b>  |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah kendaraan dinas jabatan yang terpenuhi Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraannya |                |               | unit    |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |

| INDIKATOR KINERJA                                                                                                     | TERGET<br>NSPK | TERGET<br>IKK | Satuan | TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH KE - |            |            |            |            | REALISASI CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO CAPAIAN TAHUN KE - |            |            |            |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                                       |                |               |        | Tahun 2020                           | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020                   | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Tahun 2020               | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun 2024 |
| - Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpenuhi<br>Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinannya |                |               | unit   |                                      | 21         | 21         | 21         | 21         |                              | 21         | 21         | 21         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah gedung kantor yang terehabilitas dan terpelihara                                                             |                |               | gedung |                                      | 1          | 1          | 1          | 1          |                              | 1          | 1          | 1          |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terehabilitas dan terpelihara                                        |                |               | paket  |                                      | 49         | 52         | 54         | 57         |                              | 49         | 52         | 54         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |
| - Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor yang terehabilitas dan terpelihara                              |                |               | paket  |                                      | 24         | 26         | 28         | 30         |                              | 24         | 26         | 28         |            |                          | 100        | 100        | 100        |            |

TABEL. 2.7  
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH  
KABUPATEN MEMPAWAH

| KODE                      | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |                 |                 |                 |                 | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |                 |                 |                 |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                           |                                                                                                                                   | 1                        | 2               | 3               | 4               | 5               | 1                                  | 2               | 3               | 4               | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          |                       |           |
|                           |                                                                                                                                   | TAHUN 2020               | TAHUN 2021      | TAHUN 2022      | TAHUN 2023      | TAHUN 2024      | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021      | TAHUN 2022      | TAHUN 2023      | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | ANGGARAN              | REALISASI |
| Permendagri 13 Tahun 2006 |                                                                                                                                   |                          |                 |                 |                 |                 |                                    |                 |                 |                 |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
|                           | 15 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                               | 2.146.095.300            | -               | -               | -               | -               | 1.407.572.828                      |                 |                 |                 |            | 65,59                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 01                     | Penyusunan Analisa Standar Belanja                                                                                                | 152.049.600              |                 |                 |                 |                 | -                                  | -               | -               | -               | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 15 06                     | Penyusunan Rancangan Perda ttg APBD                                                                                               | 112.710.000              |                 |                 |                 |                 | 76.347.500                         | -               | -               | -               | -          | 67,74                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 07                     | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD                                                                        | 310.098.000              |                 |                 |                 |                 | 170.361.650                        | -               | -               | -               | -          | 54,94                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 08                     | Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD                                                                      | 117.710.000              |                 |                 |                 |                 | 82.141.500                         | -               | -               | -               | -          | 69,78                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 09                     | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD                                                              | 309.272.000              |                 |                 |                 |                 | 289.803.551                        | -               | -               | -               | -          | 93,71                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 14                     | Sosialisasi paket regulasi pengelolaan keuangan daerah                                                                            | 82.654.000               |                 |                 |                 |                 | -                                  | -               | -               | -               | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 15 30                     | Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                           | 99.889.100               |                 |                 |                 |                 | 99.449.800                         | -               | -               | -               | -          | 99,56                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 31                     | Dukungan Penyediaan Kelengkapan Pengelolaan Penggajian                                                                            | 225.675.000              |                 |                 |                 |                 | 148.890.038                        | -               | -               | -               | -          | 65,98                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 32                     | Dukungan Penyediaan Kelengkapan Pengelolaan Administrasi Perbendaharaan                                                           | 252.957.600              |                 |                 |                 |                 | 181.260.289                        | -               | -               | -               | -          | 71,66                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 44                     | Dukungan dan Penyediaan Kelengkapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA)                                          | 241.500.000              |                 |                 |                 |                 | 314.435.000                        | -               | -               | -               | -          | 130,20                                              |            |            |            |            |                       |           |
| 15 47                     | Dukungan Pengelolaan Bantuan Keuangan                                                                                             | 60.000.000               |                 |                 |                 |                 | 44.883.500                         | -               | -               | -               | -          | 74,81                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 58                     | Bimbingan teknis manajemen pengelolaan keuangan daerah                                                                            | 181.580.000              |                 |                 |                 |                 | -                                  | -               | -               | -               | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019 |                                                                                                                                   |                          |                 |                 |                 |                 |                                    |                 |                 |                 |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 02.                       | Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                       |                          | 148.443.047.074 | 139.057.171.836 | 141.088.420.916 | 137.026.076.700 | -                                  | 134.292.403.614 | 131.923.122.388 | 131.000.055.338 | -          |                                                     | 90,47      | 94,87      | 92,85      | -          |                       |           |
| 02.2.01                   | - Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               |                          | 848.898.725     | 854.424.775     | 893.584.000     | 1.255.501.900   | -                                  | 843.483.885     | 850.713.800     | 881.952.850     | -          |                                                     | 99,36      | 99,57      | 98,70      | -          |                       |           |
| 02.2.01 01                | - Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          |                          | 75.993.825      | 72.383.825      | 96.258.600      | 145.086.250     |                                    | 74.899.325      | 72.377.000      | 94.578.115      |            |                                                     | 98,56      | 99,99      | 98,25      | -          |                       |           |
| 02.2.01 02                | - Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS                                                                                |                          | 60.434.775      | 52.359.525      | 46.579.300      | 102.594.550     |                                    | 60.274.525      | 52.335.400      | 45.105.420      |            |                                                     | 99,73      | 99,95      | 96,84      | -          |                       |           |
| 02.2.01 03                | - Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD                                                                                  |                          | 72.418.300      | 44.018.300      | 79.961.900      | 118.204.100     |                                    | 72.418.300      | 44.018.150      | 77.563.850      |            |                                                     | 100,00     | 100,00     | 97,00      | -          |                       |           |
| 02.2.01 04                | - Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD                                                                        |                          | 3.467.000       | 3.467.000       | 3.357.300       | 84.808.700      |                                    | 3.467.000       | 3.467.000       | 3.315.600       |            |                                                     | 100,00     | 100,00     | 98,76      | -          |                       |           |
| 02.2.01 05                | - Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD                                                                                  |                          | 24.004.000      | 24.004.000      | 23.996.700      | 40.182.400      |                                    | 21.384.000      | 24.003.900      | 23.994.800      |            |                                                     | 89,09      | 100,00     | 99,99      | -          |                       |           |
| 02.2.01 06                | - Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD                                                                        |                          | 4.959.600       | 22.939.600      | 30.849.100      | 79.579.700      |                                    | 4.709.925       | 19.639.600      | 30.845.700      |            |                                                     | 94,97      | 85,61      | 99,99      | -          |                       |           |
| 02.2.01 07                | - Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD                     |                          | 300.761.900     | 277.708.175     | 262.601.900     | 248.094.300     |                                    | 300.001.785     | 277.591.800     | 261.123.370     |            |                                                     | 99,75      | 99,96      | 99,44      | -          |                       |           |
| 02.2.01 08                | - Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD |                          | 297.178.200     | 357.544.350     | 300.653.100     | 353.731.250     |                                    | 296.648.125     | 357.280.950     | 296.367.515     |            |                                                     | 99,82      | 99,93      | 98,57      | -          |                       |           |

| KODE                                                     | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                           | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |                 |                 |                 |                 | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |                 |                 |                 |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                                                          |                                                                                                                                                                                              | 1                        | 2               | 3               | 4               | 5               | 1                                  | 2               | 3               | 4               | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          | ANGGARAN              | REALISASI |
|                                                          |                                                                                                                                                                                              | TAHUN 2020               | TAHUN 2021      | TAHUN 2022      | TAHUN 2023      | TAHUN 2024      | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021      | TAHUN 2022      | TAHUN 2023      | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |                       |           |
| 02.2.01 09                                               | - Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran                                                                                                                                |                          | 9.681.125       | -               | 49.326.100      | 83.220.650      |                                    | 9.680.900       | -               | 49.058.480      |            |                                                     | 100,00     | #DIV/0!    | 99,46      | -          |                       |           |
| 02.2.01                                                  | - Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                           |                          | 240.031.625     | 249.000.000     | 373.739.000     | 492.800.000     | -                                  | 212.411.333     | 245.107.718     | 367.607.835     | -          |                                                     | 88,49      | 98,44      | 98,36      | -          |                       |           |
| 02.2.01 01                                               | - Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      |                          | -               | 8.000.000       | 12.211.000      | 15.000.000      |                                    | -               | 7.999.700       | 11.881.207      |            |                                                     | #DIV/0!    | 100,00     | 97,30      | -          |                       |           |
| 02.2.01 03                                               | - Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                    |                          | 13.744.275      | 13.000.000      | 13.000.000      | 16.000.000      |                                    | 13.744.275      | 11.999.800      | 12.998.089      |            |                                                     | 100,00     | 92,31      | 99,99      | -          |                       |           |
| 02.2.01 05                                               | - Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Singkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                |                          | -               | 75.000.000      | 79.000.000      | 78.600.000      |                                    | -               | 73.619.118      | 77.173.616      |            |                                                     | #DIV/0!    | 98,16      | 97,69      | -          |                       |           |
| 02.2.01 06                                               | - Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank                                                          |                          | -               | 8.000.000       | 5.960.000       | 14.000.000      |                                    | -               | 7.999.700       | 5.945.629       |            |                                                     | #DIV/0!    | 100,00     | 99,76      | -          |                       |           |
| 02.2.01 07                                               | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) |                          | 94.589.900      | 65.000.000      | 85.950.000      | 110.000.000     |                                    | 81.034.633      | 63.679.800      | 82.551.142      |            |                                                     | 85,67      | 97,97      | 96,05      | -          |                       |           |
| 02.2.01 09                                               | - Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         |                          | 124.050.000     | 70.000.000      | 167.618.000     | 227.400.000     |                                    | 113.384.975     | 69.809.750      | 167.104.703     |            |                                                     | 91,40      | 99,73      | 99,69      | -          |                       |           |
| 02.2.01 10                                               | - Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              |                          | 7.647.450       | 10.000.000      | 10.000.000      | 15.000.000      |                                    | 4.247.450       | 9.999.850       | 9.953.449       |            |                                                     | 55,54      | 100,00     | 99,53      | -          |                       |           |
| 02.2.01 11                                               | - Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 |                          | -               | -               | -               | 16.800.000      |                                    | -               | -               |                 |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | -          |                       |           |
| 02.2.04                                                  | - Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                    |                          | 147.156.116.724 | 137.573.897.061 | 139.499.320.316 | 134.779.774.800 | -                                  | 133.038.508.396 | 130.470.494.620 | 129.440.490.432 | -          |                                                     | 90,41      | 94,84      | 92,79      | -          |                       |           |
| 02.2.04 08                                               | - Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                       |                          | 125.405.929.700 | 117.529.846.300 | 123.495.505.726 | 122.417.024.800 |                                    | 125.327.351.500 | 117.529.496.000 | 120.496.789.500 |            |                                                     | 99,94      | 100,00     | 97,57      | -          |                       |           |
| 02.2.04 09                                               | - Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                      |                          | 16.689.372.024  | 10.971.661.761  | 7.450.167.590   | 5.000.000.000   |                                    | 3.931.587.896   | 4.394.420.620   | 2.317.401.932   |            |                                                     | 23,56      | 40,05      | 31,11      | -          |                       |           |
| 02.2.04 10                                               | - Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                 |                          | 5.060.815.000   | 9.072.389.000   | 8.553.647.000   | 7.362.750.000   |                                    | 3.779.569.000   | 8.546.578.000   | 6.626.299.000   |            |                                                     | 74,68      | 94,20      | 77,47      | -          |                       |           |
| 02.2.05                                                  | - Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                   |                          | 198.000.000     | 379.850.000     | 321.777.600     | 498.000.000     | -                                  | 198.000.000     | 356.806.250     | 310.004.221     | -          |                                                     | 100,00     | 93,93      | 96,34      | -          |                       |           |
| 02.2.05 02                                               | - Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah                                                                                                    |                          | 198.000.000     | 379.850.000     | 321.777.600     | 498.000.000     |                                    | 198.000.000     | 356.806.250     | 310.004.221     |            |                                                     | 100,00     | 93,93      | 96,34      | -          |                       |           |
| Permendagri 13 Tahun 2006                                |                                                                                                                                                                                              |                          |                 |                 |                 |                 |                                    |                 |                 |                 |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 15                                                       | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                             | 237.428.600              | -               | -               | -               | -               | 185.071.050                        |                 |                 |                 |            | 77,95                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 10                                                    | Penyusunan Raperda ttg Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                  | 34.930.600               |                 |                 |                 |                 | 33.742.100                         | -               | -               | -               | -          | 96,60                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 11                                                    | Penyusunan Rancangan Peraturan KDH ttg Penjabaran Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                       | 202.498.000              |                 |                 |                 |                 | 151.328.950                        | -               | -               | -               | -          | 74,73                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 16 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan |                                                                                                                                                                                              | 936.674.000              | -               | -               | -               | -               |                                    |                 |                 |                 |            | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 06                                                    | Pengendalian dan Pelaksanaan Anggaran                                                                                                                                                        | 40.999.000               |                 |                 |                 |                 | 41.897.600                         | -               | -               | -               | -          | 102,19                                              |            |            |            |            |                       |           |
| 16 07                                                    | Penyusunan Laporan Konsolidasi Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                   | 325.785.000              |                 |                 |                 |                 | 192.895.450                        | -               | -               | -               | -          | 59,21                                               |            |            |            |            |                       |           |

| KODE                      | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                                                                                                                      | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |             | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                           |                                                                                                                                                                                                                         | 1                        | 2           | 3           | 4           | 5           | 1                                  | 2           | 3           | 4           | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          | ANGGARAN              | REALISASI |
|                           |                                                                                                                                                                                                                         | TAHUN 2020               | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024  | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |                       |           |
| 16 09                     | Pembinaan akuntansi pertanggung jawaban belanja dan pelaporan keuangan SKPD                                                                                                                                             | 19.000.000               |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 12                     | Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Pendapatan Daerah                                                                                                                                                                       | 55.250.000               |             |             |             |             | 34.866.084                         | -           | -           | -           | -          | 63,11                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 16 13                     | Pembinaan Akuntansi, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Transfer                                                                                                                                                     | 162.500.000              |             |             |             |             | 120.122.548                        | -           | -           | -           | -          | 73,92                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 16 .....                  | Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban Pendapatan SKPD dan PPKD                                                                                                                                                        | 85.000.000               |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 .....                  | Penyusunan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah (IKPD)                                                                                                                                                        | 19.140.000               |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 .....                  | Rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban keuangan SKPD                                                                                                                                                                   | 129.000.000              |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 .....                  | Sosialisasi kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                                                                       | 55.000.000               |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 .....                  | Pronogsis penyusunan laporan keuangan semester I Pemerintah Daerah                                                                                                                                                      | 45.000.000               |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019 |                                                                                                                                                                                                                         |                          |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 02.                       | Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                                                             |                          | 503.009.400 | 492.708.998 | 560.043.328 | 674.966.178 |                                    | 502.504.048 | 484.117.681 | 555.961.557 | -          |                                                     | 99,90      | 98,26      | 99,27      | -          |                       |           |
| 02.2.03                   | - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                    |                          | 503.009.400 | 492.708.998 | 560.043.328 | 674.966.178 |                                    | 502.504.048 | 484.117.681 | 555.961.557 |            |                                                     | 99,90      | 98,26      | 99,27      | -          |                       |           |
| 02.2.03 01                | - Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                |                          | -           | 15.000.000  | 11.000.000  | 15.000.000  |                                    | -           | 14.960.000  | 10.998.100  |            |                                                     | #DIV/0!    | 99,73      | 99,98      | -          |                       |           |
| 02.2.03 02                | - Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                        |                          | 142.170.550 | 131.770.498 | 147.109.128 | 160.103.978 |                                    | 142.109.698 | 131.580.348 | 146.784.216 |            |                                                     | 99,96      | 99,86      | 99,78      | -          |                       |           |
| 02.2.03 03                | - Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                  |                          | -           | 15.000.000  | 6.868.000   | 39.963.200  |                                    | -           | 14.760.000  | 6.703.850   |            |                                                     | #DIV/0!    | 98,40      | 97,61      | -          |                       |           |
| 02.2.03 04                | - Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        |                          | 170.445.850 | 175.545.500 | 226.000.000 | 249.899.200 |                                    | 170.348.350 | 175.118.658 | 224.695.618 |            |                                                     | 99,94      | 99,76      | 99,42      | -          |                       |           |
| 02.2.03 05                | - Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |                          | 170.393.000 | 145.393.000 | 155.426.200 | 180.000.000 |                                    | 170.056.000 | 137.818.675 | 154.429.753 |            |                                                     | 99,80      | 94,79      | 99,36      | -          |                       |           |
| 02.2.03 06                | - Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                  |                          | -           | -           | -           | -           |                                    | -           |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 02.2.03 08                | - Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                       |                          | -           | -           | -           | -           |                                    | -           |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 02.2.03 09                | - Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       |                          | -           | -           | -           | -           |                                    | -           |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 02.2.03 10                | - Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     |                          | -           | -           | -           | -           |                                    | -           |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 02.2.03 11                | - Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       |                          | 20.000.000  | 10.000.000  | 13.640.000  | 29.999.800  |                                    | 19.990.000  | 9.880.000   | 12.350.020  |            |                                                     | 99,95      | 98,80      | 90,54      | -          |                       |           |
| 02.2.03 12                | - Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                    |                          | -           | -           | -           | -           |                                    | -           |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| Permendagri 13 Tahun 2006 |                                                                                                                                                                                                                         |                          |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 15                        | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                        | 1.224.105.300            | -           | -           | -           | -           | 696.822.771                        |             |             |             |            | 56,93                                               |            |            |            |            |                       |           |

| KODE                      | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                       | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |               | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                           |                                                                                                          | 1                        | 2           | 3           | 4           | 5             | 1                                  | 2           | 3           | 4           | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          | ANGGARAN              | REALISASI |
|                           |                                                                                                          | TAHUN 2020               | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024    | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |                       |           |
| 15 02                     | Penyusunan Standar Satuan Harga                                                                          | 284.971.000              |             |             |             |               |                                    |             |             |             |            | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 15 16                     | Peningkatan Manjemen Aset / Barang Daerah                                                                | 477.393.100              |             |             |             |               | 406.040.271                        | -           | -           | -           | -          | 85,05                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 35                     | Penyusunan Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan BMD                                                        | 34.710.200               |             |             |             |               | 30.048.500                         | -           | -           | -           | -          | 86,57                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 51                     | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                           | 132.861.000              |             |             |             |               | 75.833.600                         | -           | -           | -           | -          | 57,08                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 15 56                     | Penghapusan dan Bouw Valliq Bangunan milik Pemerintah Kab. Mempawah                                      | 132.218.500              |             |             |             |               | 183.575.400                        | -           | -           | -           | -          | 138,84                                              |            |            |            |            |                       |           |
| 15 61                     | Penyusunan Data Base Aset Daerah                                                                         | 62.988.000               |             |             |             |               | 1.325.000                          | -           | -           | -           | -          | 2,10                                                |            |            |            |            |                       |           |
| 15 66                     | Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah/Aset Daerah                                        | 98.963.500               |             |             |             |               |                                    |             |             |             |            | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019 |                                                                                                          |                          |             |             |             |               |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 03                        | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                          |                          | 678.002.480 | 966.135.150 | 914.059.046 | 1.108.388.606 | -                                  | 664.651.971 | 921.906.287 | 885.404.713 | -          |                                                     | 98,03      | 95,42      | 96,87      | -          |                       |           |
| 03.2.01                   | - Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                        |                          | 678.002.480 | 966.135.150 | 914.059.046 | 1.108.388.606 | -                                  | 664.651.971 | 921.906.287 | 885.404.713 | -          |                                                     | 98,03      | 95,42      | 96,87      | -          |                       |           |
| 03.2.01 01                | - Penyusunan Standar Satuan Harga                                                                        |                          | 92.936.000  | 192.569.925 | 186.269.800 | 240.359.550   |                                    | 90.505.975  | 192.004.600 | 183.262.100 |            |                                                     | 97,39      | 99,71      | 98,39      | -          |                       |           |
| 03.2.01 02                | - Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                       |                          | -           | -           | -           | -             |                                    | -           | -           |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 03.2.01 03                | - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                   |                          | 19.661.290  | 18.636.075  | 29.207.800  | 30.762.700    |                                    | 17.891.175  | 17.285.900  | 25.874.800  |            |                                                     | 91,00      | 92,76      | 88,59      | -          |                       |           |
| 03.2.01 04                | - Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   |                          | -           | -           | -           | -             |                                    | -           | -           |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 03.2.01 05                | - Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                      |                          | 250.000.000 | 347.598.300 | 388.770.796 | 346.453.256   |                                    | 248.325.696 | 332.156.387 | 382.802.586 |            |                                                     | 99,33      | 95,56      | 98,46      | -          |                       |           |
| 03.2.01 06                | - Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                      |                          | -           | -           | -           | -             |                                    | -           | -           |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 03.2.01 07                | - Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                         |                          | 41.147.700  | 79.117.700  | 53.941.200  | 85.608.850    |                                    | 40.932.200  | 78.357.650  | 51.320.550  |            |                                                     | 99,48      | 99,04      | 95,14      | -          |                       |           |
| 03.2.01 08                | - Penilaian Barang Milik Daerah                                                                          |                          | 1.790.000   | 119.867.700 | 65.902.450  | 104.279.150   |                                    | 1.790.000   | 97.577.700  | 59.701.437  |            |                                                     | 100,00     | 81,40      | 90,59      | -          |                       |           |
| 03.2.01 09                | - Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang                                                         |                          | 24.895.000  | -           | -           | 90.000.000    |                                    | 23.615.000  | -           |             |            |                                                     | 94,86      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | -          |                       |           |
| 03.2.01 10                | - Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah |                          | 111.140.350 | 107.797.100 | 58.336.700  | -             |                                    | 110.635.250 | 105.116.700 | 56.186.485  |            |                                                     | 99,55      | 97,51      | 96,31      | #DIV/0!    |                       |           |
| 03.2.01 11                | - Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah                                       |                          | 59.861.640  | 59.861.450  | 70.011.300  | 134.116.550   |                                    | 58.356.425  | 58.721.450  | 67.536.630  |            |                                                     | 97,49      | 98,10      | 96,47      | -          |                       |           |
| 03.2.01 12                | - Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                 |                          | 24.321.500  | 40.686.900  | 61.619.000  | 76.808.550    |                                    | 24.111.250  | 40.685.900  | 58.720.125  |            |                                                     | 99,14      | 100,00     | 95,30      | -          |                       |           |
| 03.2.01 13                | - Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                    |                          | 52.249.000  | -           | -           | -             |                                    | 48.489.000  | -           |             |            |                                                     | 92,80      | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| Permendagri 13 Tahun 2006 |                                                                                                          |                          |             |             |             |               |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 06                        | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan                                   | 45.000.000               |             |             |             |               | 29.914.800                         |             |             |             |            | 66,48                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 06 01                     | Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD                                   | 15.000.000               |             |             |             |               | 14.959.500                         | -           | -           | -           | -          | 99,73                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 06 05                     | Penyusunan dokumen perencanaan SKPD                                                                      | 30.000.000               |             |             |             |               | 14.955.300                         | -           | -           | -           | -          | 49,85                                               |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019 |                                                                                                          |                          |             |             |             |               |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 01                        | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                      |                          | 30.000.000  | 30.000.000  | 30.000.000  | 29.999.200    | -                                  | 29.990.000  | 29.968.500  | 29.751.896  | -          |                                                     | 99,97      | 99,90      | 99,17      | -          |                       |           |

| KODE                                                                      | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                      | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |               |               |               |               | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |               |               |               |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                                                                           |                                                                                         | 1                        | 2             | 3             | 4             | 5             | 1                                  | 2             | 3             | 4             | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          | ANGGARAN              | REALISASI |
|                                                                           |                                                                                         | TAHUN 2020               | TAHUN 2021    | TAHUN 2022    | TAHUN 2023    | TAHUN 2024    | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021    | TAHUN 2022    | TAHUN 2023    | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |                       |           |
| 01.2.01                                                                   | - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       |                          | 30.000.000    | 30.000.000    | 30.000.000    | 29.999.200    | -                                  | 29.990.000    | 29.968.500    | 29.751.896    | -          |                                                     | 99,97      | 99,90      | 99,17      | -          |                       |           |
| 01.2.01 01                                                                | - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                          | 5.000.000     | 5.000.000     | 5.000.000     | 5.000.000     |                                    | 5.000.000     | 4.999.750     | 4.840.850     |            |                                                     | 100,00     | 100,00     | 96,82      | -          |                       |           |
| 01.2.01 02                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                          | 3.000.000     | 3.000.000     | 3.000.000     | 3.000.000     |                                    | 3.000.000     | 2.999.800     | 2.972.645     |            |                                                     | 100,00     | 99,99      | 99,09      | -          |                       |           |
| 01.2.01 03                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                          | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     | 1.999.700     |                                    | 2.000.000     | 1.999.700     | 1.996.160     |            |                                                     | 100,00     | 99,99      | 99,81      | -          |                       |           |
| 01.2.01 04                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                          | 3.000.000     | 3.000.000     | 3.000.000     | 3.000.000     |                                    | 3.000.000     | 2.999.800     | 2.971.845     |            |                                                     | 100,00     | 99,99      | 99,06      | -          |                       |           |
| 01.2.01 05                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                          | 2.000.000     | 2.000.000     | 2.000.000     | 1.999.700     |                                    | 2.000.000     | 1.999.700     | 1.996.160     |            |                                                     | 100,00     | 99,99      | 99,81      | -          |                       |           |
| 01.2.01 06                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |                          | 15.000.000    | 15.000.000    | 15.000.000    | 14.999.800    |                                    | 14.990.000    | 14.969.750    | 14.974.236    |            |                                                     | 99,93      | 99,80      | 99,83      | -          |                       |           |
| Permendagri 13 Tahun 2006                                                 |                                                                                         |                          |               |               |               |               |                                    |               |               |               |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 06 Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |                                                                                         | 27.500.000               |               |               |               |               | 27.476.800                         |               |               |               |            | 99,92                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 06 02                                                                     | Penyusunan laporan Keuangan Semesteran                                                  | 5.000.000                |               |               |               |               | 4.987.300                          | -             | -             | -             | -          | 99,75                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 06 04                                                                     | Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun                                               | 22.500.000               |               |               |               |               | 22.489.500                         | -             | -             | -             | -          | 99,95                                               |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019                                                 |                                                                                         |                          |               |               |               |               |                                    |               |               |               |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 01                                                                        | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                     |                          | 5.141.686.385 | 4.917.977.998 | 5.022.244.290 | 6.030.810.795 | -                                  | 4.682.475.196 | 4.769.738.179 | 4.832.284.469 | -          |                                                     | 91,07      | 96,99      | 96,22      | -          |                       |           |
| 01.2.02                                                                   | - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                |                          | 5.141.686.385 | 4.917.977.998 | 5.001.344.290 | 6.009.910.795 | -                                  | 4.682.475.196 | 4.769.738.179 | 4.811.742.139 | -          |                                                     | 91,07      | 96,99      | 96,21      | -          |                       |           |
| 01.2.02 01                                                                | - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |                          | 5.094.186.385 | 4.870.477.998 | 4.909.924.290 | 5.918.491.595 |                                    | 4.635.185.296 | 4.722.238.779 | 4.721.324.585 |            |                                                     | 90,99      | 96,96      | 96,16      | -          |                       |           |
| 01.2.02 03                                                                | - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      |                          | 12.500.000    | 12.500.000    | 56.420.000    | 56.419.650    |                                    | 12.499.900    | 12.499.800    | 55.706.150    |            |                                                     | 100,00     | 100,00     | 98,73      | -          |                       |           |
| 01.2.02 05                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           |                          | 27.500.000    | 27.500.000    | 27.500.000    | 27.499.850    |                                    | 27.290.000    | 27.499.800    | 27.220.659    |            |                                                     | 99,24      | 100,00     | 98,98      | -          |                       |           |
| 01.2.02 07                                                                | - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         |                          | 7.500.000     | 7.500.000     | 7.500.000     | 7.499.700     |                                    | 7.500.000     | 7.499.800     | 7.490.745     |            |                                                     | 100,00     | 100,00     | 99,88      | -          |                       |           |
| 01.2.03                                                                   | - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                                |                          | -             | -             | 20.900.000    | 20.900.000    | -                                  | -             | -             | 20.542.330    | -          |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | 98,29      | -          |                       |           |
| 01.2.03 01                                                                | - Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD                                           |                          | -             | -             | 20.900.000    | 20.900.000    |                                    | -             | -             | 20.542.330    |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | 98,29      | -          |                       |           |
| Permendagri 13 Tahun 2006                                                 |                                                                                         |                          |               |               |               |               |                                    |               |               |               |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur                                  |                                                                                         | 32.860.000               |               |               |               |               | 27.845.000                         |               |               |               |            | 84,74                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 03 02                                                                     | Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya                                         | 32.860.000               |               |               |               |               | 27.845.000                         | -             | -             | -             | -          | 84,74                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya aparatur                     |                                                                                         | 70.000.000               |               |               |               |               | 19.426.952                         |               |               |               |            | 27,75                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 05 02                                                                     | Sosialisasi peraturan Perundang-undangan                                                | 70.000.000               |               |               |               |               | 19.426.952                         | -             | -             | -             | -          | 27,75                                               |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019                                                 |                                                                                         |                          |               |               |               |               |                                    |               |               |               |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 01                                                                        | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                     |                          | 37.443.000    | 69.400.800    | 50.000.000    | 57.443.000    | -                                  | 33.243.400    | 61.364.600    | 49.468.000    | -          |                                                     | 88,78      | 88,42      | 98,94      | -          |                       |           |
| 01.2.05                                                                   | - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             |                          | 37.443.000    | 69.400.800    | 50.000.000    | 57.443.000    | -                                  | 33.243.400    | 61.364.600    | 49.468.000    | -          |                                                     | 88,78      | 88,42      | 98,94      | -          |                       |           |
| 01.2.05 02                                                                | - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                |                          | 32.443.000    | 29.400.800    | -             | 32.443.000    |                                    | 28.253.400    | 26.811.600    | -             |            |                                                     | 87,09      | 91,19      | #DIV/0!    | -          |                       |           |
| 01.2.05 10                                                                | - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                              |                          | 5.000.000     | 40.000.000    | 50.000.000    | 25.000.000    |                                    | 4.990.000     | 34.553.000    | 49.468.000    |            |                                                     | 99,80      | 86,38      | 98,94      | -          |                       |           |

| KODE                                                         | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                   | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |             | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                                                              |                                                                      | 1                        | 2           | 3           | 4           | 5           | 1                                  | 2           | 3           | 4           | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          |                       |           |
|                                                              |                                                                      | TAHUN 2020               | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024  | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | ANGGARAN              | REALISASI |
| Permendagri 13 Tahun 2006                                    |                                                                      |                          |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 01                                                           | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran                           | 319.000.000              |             |             |             |             | 534.844.205                        |             |             |             |            | 167,66                                              |            |            |            |            |                       |           |
| 01 01                                                        | Penyediaan jasa surat menyurat                                       | 5.000.000                |             |             |             |             | 1.658.000                          | -           | -           | -           | -          | 33,16                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 02                                                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik              | 2.500.000                |             |             |             |             | 247.092.949                        | -           | -           | -           | -          | 9.883,72                                            |            |            |            |            |                       |           |
| 01 06                                                        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Ops       | 13.000.000               |             |             |             |             | 8.126.900                          | -           | -           | -           | -          | 62,51                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 07                                                        | Penyediaan jasa adminitrasi keuangan                                 | 4.500.000                |             |             |             |             | 2.250.000                          | -           | -           | -           | -          | 50,00                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 08                                                        | Penyediaan Jasa Kebersihan kantor                                    | 6.100.000                |             |             |             |             | 73.488.088                         | -           | -           | -           | -          | 1.204,72                                            |            |            |            |            |                       |           |
| 01 10                                                        | Penyediaan Alat tulis kantor                                         | 28.000.000               |             |             |             |             | 27.992.600                         | -           | -           | -           | -          | 99,97                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 11                                                        | Penyediaan Bahan cetakan dan Penggandaan                             | 52.000.000               |             |             |             |             | 41.993.400                         | -           | -           | -           | -          | 80,76                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 12                                                        | Penyediaan Komponen instalasi Listrik/ penerangan bangunan kantor    | 12.000.000               |             |             |             |             | 17.625.000                         | -           | -           | -           | -          | 146,88                                              |            |            |            |            |                       |           |
| 01 15                                                        | Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan                       | 2.500.000                |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 01 17                                                        | Penyediaan Makanan dan Minuman                                       | 36.000.000               |             |             |             |             | 20.880.000                         | -           | -           | -           | -          | 58,00                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 18                                                        | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah                  | 130.000.000              |             |             |             |             | 54.912.268                         | -           | -           | -           | -          | 42,24                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 19                                                        | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah                 | 25.000.000               |             |             |             |             | 14.825.000                         | -           | -           | -           | -          | 59,30                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 01 21                                                        | Penyediaan Jasa Pendukung keamanan dan ketertiban /pengamanan kantor | 2.400.000                |             |             |             |             | 24.000.000                         | -           | -           | -           | -          | 1.000,00                                            |            |            |            |            |                       |           |
| 16 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah |                                                                      | 35.081.300               |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 16 02                                                        | Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah                          | 35.081.300               |             |             |             |             | 35.080.300                         | -           | -           | -           | -          | 100,00                                              |            |            |            |            |                       |           |
| 18 Program Kerjasama Pameran Informasi dan Media Massa       |                                                                      | 20.000.000               |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| 18 04                                                        | Dukungan Pameran Informasi Pelayanan Publik                          | 20.000.000               |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | -                                                   |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019                                    |                                                                      |                          |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 01                                                           | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                  |                          | 584.942.700 | 627.498.686 | 678.790.768 | 597.040.450 |                                    | 556.765.307 | 587.285.487 | 645.959.672 | -          |                                                     | 95,18      | 93,59      | 95,16      | -          |                       |           |
| 01.2.06                                                      | - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                 |                          | 238.042.700 | 250.638.150 | 268.366.700 | 257.780.450 |                                    | 232.247.225 | 246.554.408 | 251.391.547 | -          |                                                     | 97,57      | 98,37      | 93,67      | -          |                       |           |
| 01.2.06 01                                                   | - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor   |                          | 15.993.500  | 28.542.800  | 27.828.300  | 27.828.300  |                                    | 15.967.500  | 28.542.800  | 27.743.000  |            |                                                     | 99,84      | 100,00     | 99,69      | -          |                       |           |
| 01.2.06 02                                                   | - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                       |                          | 78.804.800  | 59.252.000  | 54.538.400  | 59.254.300  |                                    | 78.486.300  | 59.252.000  | 50.648.400  |            |                                                     | 99,60      | 100,00     | 92,87      | -          |                       |           |
| 01.2.06 04                                                   | - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                   |                          | 30.000.000  | 39.600.000  | 36.000.000  | 36.000.000  |                                    | 26.640.000  | 36.000.000  | 25.749.380  |            |                                                     | 88,80      | 90,91      | 71,53      | -          |                       |           |
| 01.2.06 05                                                   | - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                          |                          | 71.998.800  | 51.997.750  | 30.000.000  | 34.999.700  |                                    | 70.991.425  | 51.997.450  | 29.516.860  |            |                                                     | 98,60      | 100,00     | 98,39      | -          |                       |           |
| 01.2.06 07                                                   | - Penyediaan Bahan/Material                                          |                          | -           | -           | -           | -           |                                    |             |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 01.2.06 09                                                   | - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD               |                          | 30.000.000  | 60.000.000  | 105.000.000 | 84.700.000  |                                    | 29.525.000  | 59.516.558  | 103.034.452 |            |                                                     | 98,42      | 99,19      | 98,13      | -          |                       |           |
| 01.2.06 10                                                   | - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                              |                          | 11.245.600  | 11.245.600  | 15.000.000  | 14.998.150  |                                    | 10.637.000  | 11.245.600  | 14.699.455  |            |                                                     | 94,59      | 100,00     | 98,00      | -          |                       |           |

| KODE                                                    | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                                                   | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |             | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |             |             |             |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|                                                         |                                                                                                                      | 1                        | 2           | 3           | 4           | 5           | 1                                  | 2           | 3           | 4           | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          | ANGGARAN              | REALISASI |
|                                                         |                                                                                                                      | TAHUN 2020               | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024  | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021  | TAHUN 2022  | TAHUN 2023  | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 |                       |           |
| 01.2.08                                                 | - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               |                          | 346.900.000 | 376.860.536 | 410.424.068 | 339.260.000 | -                                  | 324.518.082 | 340.731.079 | 394.568.125 | -          |                                                     | 93,55      | 90,41      | 96,14      | -          |                       |           |
| 01.2.08 01                                              | - Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                                                     |                          | 2.500.000   | 2.500.000   | -           | -           |                                    | 728.000     | 366.250     | -           |            |                                                     | 29,12      | 14,65      | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 01.2.08 02                                              | - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            |                          | 260.400.000 | 285.400.000 | 285.400.000 | 235.400.000 |                                    | 239.808.238 | 251.700.461 | 270.817.935 |            |                                                     | 92,09      | 88,19      | 94,89      | -          |                       |           |
| 01.2.08 04                                              | - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              |                          | 84.000.000  | 88.960.536  | 125.024.068 | 103.860.000 |                                    | 83.981.844  | 88.664.368  | 123.750.190 |            |                                                     | 99,98      | 99,67      | 98,98      | -          |                       |           |
| Permendagri 13 Tahun 2006                               |                                                                                                                      |                          |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran |                                                                                                                      | 160.881.000              |             |             |             |             | 146.259.156                        |             |             |             |            | 90,91                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 05                                                   | Pengadaan kendaraan dinas/oparasional                                                                                | 0,00                     |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | #DIV/0!                                             |            |            |            |            |                       |           |
| 02 07                                                   | Pengadaan perlengkapan gedung/kantor                                                                                 | 0,00                     |             |             |             |             | 23.500.000                         | -           | -           | -           | -          | #DIV/0!                                             |            |            |            |            |                       |           |
| 02 10                                                   | Pengadaan meubelair                                                                                                  | 0,00                     |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | #DIV/0!                                             |            |            |            |            |                       |           |
| 02 11                                                   | Pengadaan komputer                                                                                                   | 20.000.000               |             |             |             |             | 17.250.000                         | -           | -           | -           | -          | 86,25                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 14                                                   | Pengadaan Instalasi listrik dan telepon                                                                              | 0,00                     |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | #DIV/0!                                             |            |            |            |            |                       |           |
| 02 22                                                   | Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor                                                                             | 30.000.000               |             |             |             |             | 14.839.000                         | -           | -           | -           | -          | 49,46                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 23                                                   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Mobil Jabatan                                                                            | 22.861.000               |             |             |             |             | 22.775.175                         | -           | -           | -           | -          | 99,62                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 24                                                   | Pemeliharaan rutin/ Berkala kendaraan Dinas/Operasional                                                              | 28.020.000               |             |             |             |             | 27.964.081                         | -           | -           | -           | -          | 99,80                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 26                                                   | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor                                                               | 40.000.000               |             |             |             |             | 24.949.900                         | -           | -           | -           | -          | 62,37                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 30                                                   | Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer                                                                                | 20.000.000               |             |             |             |             | 14.981.000                         | -           | -           | -           | -          | 74,91                                               |            |            |            |            |                       |           |
| 02 44                                                   | Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional                                                                | 0,00                     |             |             |             |             | -                                  | -           | -           | -           | -          | #DIV/0!                                             |            |            |            |            |                       |           |
| Permendagri 90 Tahun 2019                               |                                                                                                                      |                          |             |             |             |             |                                    |             |             |             |            |                                                     |            |            |            |            |                       |           |
| 01                                                      | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                                  |                          | 137.372.000 | 864.840.550 | 219.122.850 | 274.680.790 | -                                  | 129.745.471 | 809.964.500 | 206.494.000 | -          |                                                     | 94,45      | 93,65      | 94,24      | -          |                       |           |
| 01.2.07                                                 | - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                   |                          | 20.000.000  | 734.171.650 | 40.000.000  | 94.948.140  | -                                  | 19.844.000  | 683.864.000 | 39.880.000  | -          |                                                     | 99,22      | 93,15      | 99,70      | -          |                       |           |
| 01.2.07 02                                              | - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                |                          | -           | -           | -           | 49.950.000  |                                    |             |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | -          |                       |           |
| 01.2.07 06                                              | - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              |                          | -           | -           | -           | -           |                                    |             |             |             |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    |                       |           |
| 01.2.07 10                                              | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 |                          | 20.000.000  | 734.171.650 | 40.000.000  |             |                                    | 19.844.000  | 683.864.000 | 39.880.000  |            |                                                     | 99,22      | 93,15      | 99,70      | #DIV/0!    |                       |           |
| 01.2.07 11                                              | - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       |                          | -           | -           | -           | 44.998.140  |                                    | -           | -           | -           |            |                                                     | #DIV/0!    | #DIV/0!    | #DIV/0!    | -          |                       |           |
| 01.2.09                                                 | - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                              |                          | 117.372.000 | 130.668.900 | 179.122.850 | 179.732.650 | -                                  | 109.901.471 | 126.100.500 | 166.614.000 | -          |                                                     | 93,64      | 96,50      | 93,02      | -          |                       |           |
| 01.2.09 01                                              | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |                          | 19.861.000  | 19.861.000  | 22.859.450  | 22.859.450  |                                    | 18.914.693  | 18.344.450  | 20.519.400  |            |                                                     | 95,24      | 92,36      | 89,76      | -          |                       |           |
| 01.2.09 02                                              | - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   |                          | 41.020.000  | 55.990.900  | 49.995.400  | 62.379.200  |                                    | 38.242.278  | 53.790.250  | 45.137.700  |            |                                                     | 93,23      | 96,07      | 90,28      | -          |                       |           |
| 01.2.09 09                                              | - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       |                          | 14.991.000  | 4.997.000   | 34.968.000  | 43.194.000  |                                    | 13.731.000  | 4.997.000   | 34.968.000  |            |                                                     | 91,59      | 100,00     | 100,00     | -          |                       |           |

| KODE       | PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN                                                             | ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN KE - |            |            |            |            | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------|-----------|
|            |                                                                                                | 1                        | 2          | 3          | 4          | 5          | 1                                  | 2          | 3          | 4          | 5          | 1                                                   | 2          | 3          | 4          | 5          |                       |           |
|            |                                                                                                | TAHUN 2020               | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                         | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | TAHUN 2020                                          | TAHUN 2021 | TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | ANGGARAN              | REALISASI |
| 01.2.09 10 | - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya           |                          | 15.000.000 | 19.870.000 | 41.570.000 | 21.570.000 |                                    | 13.132.000 | 19.630.000 | 36.290.000 |            |                                                     | 87,55      | 98,79      | 87,30      | -          |                       |           |
| 01.2.09 11 | - Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya |                          | 26.500.000 | 29.950.000 | 29.730.000 | 29.730.000 |                                    | 25.881.500 | 29.338.800 | 29.698.900 |            |                                                     | 97,67      | 97,96      | 99,90      | -          |                       |           |

## **2.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah merupakan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan unsur penunjang urusan pemerintahan yang memiliki tugas melaksanakan Urusan di bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun kelompok sasaran layanan dari BPKAD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dan seluruh pemangku kepentingan.

Karena itu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah melalui penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah harus mampu mengawinkan kebijakan pemerintah dan aspirasi kebutuhan masyarakat di daerah sehingga melahirkan kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung kebijakan pemerintah dan disisi lain berorientasi pada pemenuhan kebutuhan publik akan pelayanan publik yang prima.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

### **PERANGKAT DAERAH**

Isu-isu strategis merupakan salah satu sumber masukan dalam melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal terhadap proses perencanaan. Jika analisis lingkungan eksternal dan internal diidentifikasi dengan baik dan tepat, maka pemerintahan daerah dalam 5 (lima) tahun kedepan akan dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menyesuaikan atau memperhatikan isu strategisnya kemungkinan akan menghadapi hambatan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau tidak berhasil dalam mencapai tujuan yang hendak di capai.

Sebagai lembaga teknis, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Mempawah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinir dinas daerah dan lembaga teknis daerah lainnya dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

#### **3.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Setelah dilakukan analisis secara seksama maka teridentifikasi permasalahan yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam melakukan pengelolaan keuangan dan asset. Permasalahan yang paling nampak dihadapi saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Aparatur dibidang akuntansi sehingga perlu penambahan SDM dibidang Akuntansi, Manajemen Aset Daerah dan teknologi informasi yang bekerja baik profesional dan

penuh tanggung jawab terhadap tugas yang kewajibannya. Hal ini berkaitan dengan telah diterapkannya *accrual basis accounting* di instansi pemerintah Kabupaten Mempawah.

- b. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang DESA, yang mana pemerintah daerah diwajibkan ikut serta dalam pengelolaan dana desa, dimana Kabupaten Mempawah memiliki 60 (enam puluh) desa yang harus diberikan pembinaan dan pemahaman praktis tentang bagaimana mengelola dana desa dan merealisasikannya dengan benar sesuai dengan tata aturan perundangan yang berlaku. Dan dalam hal ini sangat perlu untuk dikembangkan integrasi pengelolaan keuangan desa dengan pengelolaan keuangan daerah agar serapan dana desa bisa di kontrol dan di audit perkembangannya dari waktu ke waktu.
- c. Belum optimalnya proses pembahasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, hal ini dapat mengakibatkan proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Cepatnya perubahan beberapa peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan sehingga memungkinkan Peraturan yang berubah dapat menimbulkan multi tafsir.
- e. Aspek lain yang tak kalah pentingnya dari tugas pokok dan fungsi BPKAD Kabupaten Mempawah dalam mengelola keuangan dan juga aset daerah adalah menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan tepat waktu. Sehingga diharapkan apa yang telah dicapai oleh pemerintah daerah Kabupaten Mempawah yakni *Opini WTP* atau Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan

Republik Indonesia atas LKPD pemerintah daerah tahun 2016 sampai dengan 2022 dapat dipertahankan. Untuk itu prioritas utama adalah meningkatkan kapasitas pengelolaan manajemen aset daerah/barang milik daerah yang apabila laporan dari bidang aset terlambat atau tidak valid datanya, sangat berpengaruh pada validitas LKPD.

- f. Buku Pedoman Harga Satuan Barang (HSB) masih belum dapat menampung seluruh kebutuhan barang yang diperlukan Pemerintah Kabupaten Mempawah karena sulitnya mendapatkan informasi / data mengenai macam / jenis barang dan harga dari berbagai sumber dan adanya fluktuasi harga sesuai mekanisme pasar yang terjadi di tingkat nasional maupun lokal.
- g. Masih lemahnya koordinasi dengan unit kerja terkait.

Dan yang menjadi salah satu permasalahan juga adalah Kabupaten Mempawah merupakan Kabupaten induk yang mana telah beberapa kali mengalami pemekaran yakni dipecah menjadi Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya yang mengakibatkan Kabupaten Mempawah harus mampu menata ulang berbagai kebijakan dibidang pembangunan. Konsekuensi Logis dari akibat pemekaran Kabupaten Mempawah berdampak pada mengecilnya sumber-sumber penerimaan yang semula memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dari aspek keuangan daerah Kabupaten Mempawah menghadapi paradigma baru berkaitan dengan penerimaan keuangan, baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Bagi Hasil. Pasca Pemekaran Kabupaten Mempawah membutuhkan dana yang relatif besar untuk pembangunan dan penyediaan Infrastruktur, baik dalam jangka pendek maupun jangka menengah. Namun disisi lain, Pemerintah

Kabupaten Mempawah dihadapkan pada terbatasnya kemampuan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya pada kemampuan penggalan sumber-sumber penerimaan Daerah serta Penerimaan Lainnya.

### **3.2 Isu Strategis**

Isu strategis jangka menengah BPKAD Kabupaten Mempawah yang perlu menjadi acuan dalam penentuan program dan kegiatan prioritas pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kompetensi dan kapasitas SDM aparatur sesuai dengan standar kompetensi.
2. Belum optimalnya upaya pelayanan kepada masyarakat terkait perkembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang menuntut adanya sistem yang cepat, tepat dan mudah diakses.
3. Belum optimalnya pelayanan perkantoran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyangkut pelayanan administrasi, sarana dan prasarana, kapasitas SDM, dan manajemen kepegawaian.

#### **3.2.1 Isu Strategis dalam lingkup pengelolaan keuangan daerah :**

1. Mekanisme/Sistem pengelolaan keuangan daerah masih belum tertata dalam satu sistem yang terpadu sebagai upaya pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
2. Koordinasi komunikasi antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Mempawah dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah belum optimal.

### **3.2.2 Isu Strategis dalam lingkup pengelolaan asset daerah :**

1. Pengelolaan aset dan barang daerah belum berjalan optimal dalam upaya menghasilkan sistem informasi pengelolaan barang daerah yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
2. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkup pengelolaan aset daerah masih relatif terbatas, sementara intensitas kerja dan mobilitas personil sangat tinggi.

Dalam hal penentuan isu-isu strategis ini kita melihat kondisi lingkungan internal dan kondisi lingkungan eksternal pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah kedalam pola analisis SWOT.

Untuk mencapai hasil konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, maka diperlukan suatu strategi yang menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran yang konseptual, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Identifikasi dan analisa dilakukan dengan pendekatan SWOT yaitu berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman.

Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal dan eksternal serta perpaduan diantara dua kondisi tersebut, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

#### **Faktor Internal :**

##### **1. Kekuatan/potensi (*Strength*)**

- 1) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan organisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- 2) Tersedianya alokasi anggaran yang memadai guna penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Tersedianya sarana kerja yang memadai diantaranya berupa program aplikasi komputer dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
- 4) Personil berasal dari unit yang membidangi urusan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah.
- 5) Adanya sistem dan prosedur yang jelas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## **2. Kelemahan (*Weaknes*)**

- 1) Masih terbatasnya sarana penunjang kerja berupa tempat penyimpanan dokumen, serta prasarana penunjang kerja berupa gedung dan ruangan dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari dan pemberian layanan secara optimal kepada pihak yang berkepentingan.
- 2) Belum terpenuhinya bezetting formasi apabila dibandingkan dengan beban kerja yang ada, sehingga terjadi perangkapan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi.
- 3) Belum optimalnya kualitas pelayanan publik melalui sistem online dan transparan.
- 4) Belum optimalnya kualitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabilitas.
- 5) Masih rendahnya minat, motivasi dan pemahaman personil terhadap peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset.

- 6) Belum Optimanya transparansi pengelolaan keuangan publik yang berbasis pada e-government dan e-budgeting.

### **Faktor Eksternal :**

#### **1. Kesempatan/Peluang (*Oportunity*)**

- 1) Adanya berbagai peraturan perundangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi termasuk pelimpahan kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- 2) Adanya lembaga pemerintahan dan swasta yang mendukung upaya peningkatan kapasitas dan kinerja organisasi serta kompetensi personil.
- 3) Hubungan kerja dengan instansi terkait dan stakeholder telah terjalin dengan baik.
- 4) Adanya kesamaan tekad, pandangan dan pemahaman dari segenap aparatur pengelola keuangan seluruh SKPD dalam rangka kepatuhan terhadap perundang-undangan di bidang keuangan dan aset daerah.
- 5) Adanya dukungan baik dari pimpinan Eksekutif maupun pihak Legislatif.

#### **2. Tantangan/Ancaman (*Treath*)**

- 1) Peraturan perundangan di bidang keuangan dan aset daerah cenderung berubah-ubah dalam waktu cepat.
- 2) Adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang sehat dan good corporate governance.

- 3) Masih rendahnya kemampuan aparat pengelola keuangan dan aset daerah SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya menurut ketentuan yang berlaku.

Dari analisis SWOT diatas baik dari faktor internal dan eksternal dapat disimpulkan perlunya dukungan penuh dan komitmen dari steak holder/pimpinan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah agar kedepannya pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.

## BAB IV

### TUJUAN DAN SASARAN

#### 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

##### 4.1.1 Tujuan

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Tujuan diperlakukan guna meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi. Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah program.

Untuk menetapkan tujuan, diperlukan suatu alat bantu berupa metode atau analisis yang dapat memberikan suatu rujukan teoritis dalam menggambarkan situasi dan kondisi Kabupaten Mempawah. Salah satu metode atau analisis yang dianggap valid dan reliabel memberikan bantuan untuk memahami situasi dan kondisi Kabupaten Mempawah adalah metode atau analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities dan Threats (SWOT)*, yang akan mencermati lingkungan ekstern Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah. Dari pencermatan lingkungan intern dan ekstern ini akan diperoleh strategi yang akan menentukan faktor-faktor kunci keberhasilan guna memberikan rambu-rambu dalam menetapkan tujuan.

Agar dapat mengukur pencapaian tujuan pada suatu periode tertentu diperlukan adanya indikator kinerja tujuan, yang pada hakekatnya

merupakan benefit atau impacts dari suatu kegiatan. Untuk keperluan ini dibutuhkan adanya sistem pengukuran kinerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah.

Suatu instansi pemerintah dalam hal menetapkan tujuan harus memperhatikan:

1. Cukup jelas.
2. Diselaraskan dengan visi dan misi instansi.
3. Mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman instansi.
4. Mempertimbangkan faktor kunci keberhasilan (critical success faktor).
5. Menggambarkan hasil yang ingin dicapai.
6. Mengakomodasi issue strategis yang dihadapi.
7. Mencerminkan "*Core Area*" dimana organisasi berperan.

Berdasarkan uraian di atas Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah menetapkan 2 (dua) tujuan antara lain :

1. Meningkatkan Pelayanan Prima kepada Publik
2. Meningkatkan penguatan birokrasi yang Efektif dan Efisien

Tujuan berdimensi waktu jangka panjang (3 sampai 5 tahun). Untuk mencapai tujuan, maka setiap periode (bulan/ triwulan/ semester/ tahun atau satuan waktu yang lebih pendek dari tujuan) ditetapkan sasaran-sasaran yang diharapkan dapat mencapai tujuan sesuai dengan indikator kinerja yang diharapkan.

#### **4.1.2 Sasaran**

Oleh sebab itu, sasaran seyogyanya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil, yaitu kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat diwujudkan. Sasaran-sasaran tahunan ini akan dijadikan dasar penyusunan rencana kinerja Kabupaten, dimana akan dapat ditentukan sasaran prioritas dan pendukungnya serta instansi pelaksananya.

Adapun sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat.
2. Meningkatnya kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

| No | Tujuan OPD                                                | Indikator Tujuan           | Sasaran Strategis                                 | Indikator Sasaran                                                        | Satuan   | Kondisi Awal | Target 2025 | Target 2026 | Target 2026 |
|----|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik                | Indeks Kepuasan Masyarakat | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat           | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah                   | Predikat | B            | BB          | BB          | BB          |
| 2. | Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah | Persen   | 100          | 100         | 100         | 100         |

## 4.2 Cascading Kinerja Perangkat Daerah

Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis, IKU, dan/atau target IKU secara vertikal (vertical alignment). dari atas ke bawah dan memperhatikan tugas dan tanggung jawab dari setiap jabatan. Untuk menggambarkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, maka disusunlah bagan Cascading BPKAD agar dapat menyajikan kinerja perangkat daerah yang menyeluruh mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikator kinerjanya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 sebagai berikut :.

**Tabel 4.2**  
**Cascading Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Kabupaten Mempawah Tahun 2025 - 2026**

[illegible]

| Isu Strategis | Tujuan OPD | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target 2025 | Target 2026 | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Target | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                           | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                    | Target 2025  | Target 2026  |
|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                  | Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah                                                | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah                                      | 95 persen    | 95 persen    |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                    | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                                                   | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket      | 1 Paket      |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                        | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                                       | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                         | 1 Paket      | 1 Paket      |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                                                    | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                                                   | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                     | 1 Paket      | 1 Paket      |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Tersedinya Barang Cetakan dan Penggandaan                                                                           | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                            | 1 Paket      | 1 Paket      |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Bahan/Material                                                                                           | Tersedianya Bahan/Material                                                                                          | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                            | 1 Paket      | 1 Paket      |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                | Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                  | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                    | 10 Laporan   | 10 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                               | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                 | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                   | 4500 Dokumen | 4500 Dokumen |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                                                    | Terlaksananya proses pengadaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku                                    | Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                | 80 persen    | 80 persen    |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                 | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                  | 3 Unit       | 3 Unit       |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                               | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                | Unit         | Unit         |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                  | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                   | Unit         | Unit         |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                        | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan         | 154 Unit     | 154 Unit     |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                        |              |              |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                | Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                               | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                               | 95 persen    | 95 persen    |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                             | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                 | 36 Laporan   | 36 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                               | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                   | 12 Laporan   | 12 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        |                                                                                                                     |                                                                                                                     |                                                                                                        |              |              |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                               | Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                             | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah   | 95 persen    | 95 persen    |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 1 Unit       | 1 Unit       |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 22 Unit      | 22 Unit      |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 1 Unit       | 1 Unit       |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                  | Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 53 Unit      | 53 Unit      |

| Isu Strategis                                                                                                                              | Tujuan OPD                                                | Indikator Tujuan           | Sasaran Strategis                                 | Indikator Sasaran                                                        | Kondisi Awal | Target 2025 | Target 2026 | Program                             | Sasaran Program                                                                                                      | Indikator Program                                                                                                   | Target     | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                  | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                         | Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                              | Target 2025 | Target 2026 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                               | Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                               | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                         | 30 Unit     | 30 Unit     |
| Pengelolaan keuangan sebagai salah satu indikator dalam mewujudkan sasaran reformasi birokrasi yaitu "Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel" | Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien | Indeks Reformasi Birokrasi | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah | 100 Persen   | 100 Persen  | 100 Persen  | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran, Pelayanan Keperbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan | 100 Persen | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                          | Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                                                  | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran daerah                                                                                                    | 100 persen  | 100 persen  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |             |             |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                                     | Tersusunnya KUA dan PPAS                                                                                                                                  | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                                                                         | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                 | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                                                              | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                                                                     | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                             | Terlaksananya verifikasi RKA-SKPD                                                                                                                         | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                                | 31 Dokumen  | 31 Dokumen  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD                                                                                  | Terlaksananya verifikasi perubahan RKA-SKPD                                                                                                               | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                      | 31 Dokumen  | 31 Dokumen  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                             | Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD                                                                                                                         | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                               | 31 Dokumen  | 31 Dokumen  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD                                                                                  | Terlaksananya verifikasi perubahan DPA-SKPD                                                                                                               | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                                                      | 31 Dokumen  | 31 Dokumen  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                             | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                                                                         | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD            | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                         | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD                                                     | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                         | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                      | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                          | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |             |             |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                           | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                   | Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D                                                                                                                       | 100 persen  | 100 persen  |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                      | Tersedianya bahan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                       | 264 Dokumen | 264 Dokumen |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                            | 860 Dokumen | 860 Dokumen |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya | 7 Dokumen   | 7 Dokumen   |
|                                                                                                                                            |                                                           |                            |                                                   |                                                                          |              |             |             |                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                     |            | Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank         | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank          | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |

| Isu Strategis | Tujuan OPD | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target 2025 | Target 2026 | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Target | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                   | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                             | Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Target 2025 | Target 2026 |
|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)                                 | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)     | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 Laporan   | 2 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                          | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                         | 12 Dokumen  | 12 Dokumen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                               | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                       | 20 Dokumen  | 20 Dokumen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                  | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 Orang    | 31 Orang    |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |             |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                                          | Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                                     | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 persen  | 100 persen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                      | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 372 Laporan | 372 Laporan |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                                                              | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                            | 124 Dokumen | 124 Dokumen |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                        | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                    | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 Laporan   | 1 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                              | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                  | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 Laporan   | 2 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                        | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                        | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                         | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                             | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |

| Isu Strategis | Tujuan OPD | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target 2025 | Target 2026 | Program                                 | Sasaran Program                                                        | Indikator Program                                                                           | Target | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                       | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                           | Target 2025 | Target 2026 |
|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah      | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                   | 2 Dokumen   | 2 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah               | Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                    | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                 | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota         | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                   | 31 Orang    | 31 Orang    |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                              | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                      | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                        | 1 Lembaga   | 1 Lembaga   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |             |             |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                         | Meningkatnya kualitas pengelolaan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak    | Persentase Realisasi pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak                                                               | 100 persen  | 100 persen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                            | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                      | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                     | 1 Laporan   | 1 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                           | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                    | 1 Laporan   | 1 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                      | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                               | 1 Laporan   | 1 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |             |             |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah    | Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah                             | Persentase realisasi capaian pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                                              | 100 persen  | 100 persen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah         | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan (Persen) | 100 %  | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                 | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan                                | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan | 100 persen  | 100 persen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        |                                                                                                 |                                                                                                       |                                                                                                                                                               |             |             |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penyusunan Standar Harga                                                                        | Tersedianya Satuan Harga                                                                              | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                             | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                     | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                  | 1 Dokumen   | 1 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                            | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                     | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                  | 5 Dokumen   | 5 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                            | Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                 | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                              | 4 Dokumen   | 4 Dokumen   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                               | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                       | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                              | 1 Laporan   | 1 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                               | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                       | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                                                  | 2 Laporan   | 2 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                  | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah                                                          | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                           | 3 Laporan   | 3 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                   | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah                                                           | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                                                         | 2 Laporan   | 2 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |                                         |                                                                        |                                                                                             |        | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                             | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                              | 5 Laporan   | 5 Laporan   |

| Isu Strategis | Tujuan OPD | Indikator Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Sasaran | Kondisi Awal | Target 2025 | Target 2026 | Program | Sasaran Program | Indikator Program | Target | Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                               | Sasaran Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                     | Indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                          | Target 2025 | Target 2026 |
|---------------|------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 10 Dokumen  | 10 Dokumen  |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                        | 2 Laporan   | 2 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                  | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah                                                                               | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                              | 1 Laporan   | 1 Laporan   |
|               |            |                  |                   |                   |              |             |             |         |                 |                   |        | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                     | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                              | 31 Orang    | 31 Orang    |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah/perangkat daerah dalam manajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah, atau tahapan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Berbagai rumusan strategi yang disusun menunjukkan kemantaban pemerintah daerah/perangkat daerah dalam memegang prinsipnya sebagai pelayan masyarakat. Perencanaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien sebagai pola strategis pembangunan akan memberikan nilai tambah (*value added*) pada pencapaian pembangunan daerah dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi pembangunan daerah.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya atau satu tahun ke tahun berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan daerah.

Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Rumusan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dalam dua tahun mendatang dapat dilihat pada **Tabel 5.1.** berikut :

**Tabel. 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

| NO. | TUJUAN                                                    | SASARAN                                             | STRATEGI                                                                                | ARAH KEBIJAKAN                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik                | - Meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat           | - Peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan profesional   | - Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur yang ditunjang oleh penyediaan sarana prasarana yang memadai |
| 2.  | Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang Efektif dan Efisien | - Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | - Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel | - Peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel           |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi maka harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja. Strategi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah mencakup penentuan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang memberikan kontribusi bagi pencapaian Visi dan Misi. Kegiatan berdimensi waktu tidak lebih dari satu tahun. Kegiatan merupakan aspek operasional/ kegiatan nyata dari suatu rencana strategik yang berturut-turut diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, misi dan visi.

Adapun Program dan Kegiatan serta Pendanaan berdasarkan urusan yang ditangani Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah dijabarkan pada **Tabel 6.1** berikut ini :

Tabel. 6.1  
Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendanaan  
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah  
Periode 2025 - 2026

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

| Tujuan                                     | Sasaran                                 | KODE           | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                  | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                     |                |                     | Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                            |                                         |                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                          | Tahun 2025                                    |                     | Tahun 2026     |                     |                                                           |                                              |        |
|                                            |                                         |                |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                                          | Target                                        | Rp.                 | Target         | Rp.                 |                                                           |                                              |        |
| Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik |                                         |                |                                                                                       | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah                                                                                                                   |                                          | BB                                            |                     | BB             |                     | BB                                                        |                                              |        |
|                                            | Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat |                |                                                                                       | Indeks kepuasan masyarakat terhadap Perangkat Daerah                                                                                                                   |                                          |                                               |                     |                |                     |                                                           |                                              |        |
|                                            |                                         | 5 02 1         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH                                          | Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan                                                                                                             |                                          | 95                                            | Rp 8.187.301.000,00 | 95             | Rp 8.187.301.000,00 | 95                                                        |                                              |        |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01    | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                       | Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja                                                                                          | 100%                                     | 100%                                          | Rp 70.000.000,00    | 100%           | Rp 70.000.000,00    | 100%                                                      |                                              |        |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen                                | 1 Dokumen                                     | Rp 15.000.000,00    | 1 Dokumen      | Rp 15.000.000,00    | 1 Dokumen                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                                     | Rp 10.000.000,00    | 1 Dokumen      | Rp 10.000.000,00    | 1 Dokumen                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01 03 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                                     | Rp 7.500.000,00     | 1 Dokumen      | Rp 7.500.000,00     | 1 Dokumen                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                       | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                                     | Rp 10.000.000,00    | 1 Dokumen      | Rp 10.000.000,00    | 1 Dokumen                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01 05 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                   | 1 Dokumen                                | 1 Dokumen                                     | Rp 7.500.000,00     | 1 Dokumen      | Rp 7.500.000,00     | 1 Dokumen                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.01 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3 Dokumen                                | 3 Dokumen                                     | Rp 20.000.000,00    | 3 Dokumen      | Rp 20.000.000,00    | 3 Dokumen                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.02    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan                                                                                                                   | 100%                                     | 100%                                          | Rp 6.049.000.000,00 | 100%           | Rp 6.049.000.000,00 | 100%                                                      |                                              |        |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.02 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 49 Orang/Bulan                           | 49 Orang/Bulan                                | Rp 5.950.000.000,00 | 49 Orang/Bulan | Rp 5.950.000.000,00 | 49 Orang/Bulan                                            | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.02 03 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                      | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                    | 12 Dokumen                               | 12 Dokumen                                    | Rp 59.000.000,00    | 12 Dokumen     | Rp 59.000.000,00    | 12 Dokumen                                                | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.02 05 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                           | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                                     | 1 Laporan                                | 1 Laporan                                     | Rp 30.000.000,00    | 1 Laporan      | Rp 30.000.000,00    | 1 Laporan                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                            |                                         | 5 02 1 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD         | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD                     | 1 Laporan                                | 1 Laporan                                     | Rp 10.000.000,00    | 1 Laporan      | Rp 10.000.000,00    | 1 Laporan                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |

| Tujuan | Sasaran | KODE           | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                           | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                          | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                     |                |                     | Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |                |                                                                              |                                                                                                |                                          | Tahun 2025                                    |                     | Tahun 2026     |                     |                                                           |                                              |        |
|        |         |                |                                                                              |                                                                                                |                                          | Target                                        | Rp.                 | Target         | Rp.                 |                                                           |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.03    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                       | Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah                    | 100%                                     | 100%                                          | Rp 20.900.000,00    | 100%           | Rp 20.900.000,00    | 100%                                                      |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.03 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                  | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                                     | 1 Laporan                                | 1 Laporan                                     | Rp 20.900.000,00    | 1 Laporan      | Rp 20.900.000,00    | 1 Laporan                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.05    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                    | Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian                            | 90%                                      | 90%                                           | Rp 70.000.000,00    | 90%            | Rp 70.000.000,00    | 90%                                                       |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.05 02 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                       | Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya                                                  | 49 Orang/Bulan                           | 49 Orang/Bulan                                | Rp 35.000.000,00    | 49 Orang/Bulan | Rp 35.000.000,00    | 49 Orang/Bulan                                            | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.05 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                     | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                           | 10 orang                                 | 10 orang                                      | Rp 35.000.000,00    | 10 orang       | Rp 35.000.000,00    | 10 orang                                                  | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                           | Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum                                               | 90%                                      | 90%                                           | Rp 287.950.000,00   | 90%            | Rp 287.950.000,00   | 90%                                                       |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.06 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor             | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan             | 1 paket                                  | 1 paket                                       | Rp 28.000.000,00    | 1 paket        | Rp 28.000.000,00    | 1 paket                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                 | 1 paket                                  | 1 paket                                       | Rp 59.250.000,00    | 1 paket        | Rp 59.250.000,00    | 1 paket                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                             | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                             | 1 paket                                  | 1 paket                                       | Rp 36.000.000,00    | 1 paket        | Rp 36.000.000,00    | 1 paket                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                    | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                    | 1 paket                                  | 1 paket                                       | Rp 35.000.000,00    | 1 paket        | Rp 35.000.000,00    | 1 paket                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06 07 | Penyediaan Bahan/Material                                                    | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                    | 1 paket                                  | 1 paket                                       | Rp 30.000.000,00    | 1 paket        | Rp 30.000.000,00    | 1 paket                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                         | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                            | 10 kali                                  | 10 kali                                       | Rp 84.700.000,00    | 10 kali        | Rp 84.700.000,00    | 10 kali                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.06 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 4500 arsip                               | 4500 arsip                                    | Rp 15.000.000,00    | 4500 arsip     | Rp 15.000.000,00    | 4500 arsip                                                | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.07    | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah           | Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah        | 80%                                      | 80%                                           | Rp 1.205.601.000,00 | 80%            | Rp 1.205.601.000,00 | 80%                                                       |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.07 02 | Pengadaan kendaraan dinas operasional dan lapangan                           | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                          | 2 unit                                   | 3 unit                                        | Rp 432.500.000,00   | 3 unit         | Rp 432.500.000,00   | 3 unit                                                    | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.07 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | -                                        | -                                             | Rp -                | -              | Rp -                | -                                                         |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.07 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | -                                        | -                                             | Rp -                | -              | Rp -                | -                                                         |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.07 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | -                                        | 154 buah                                      | Rp 773.101.000,00   | 154 buah       | Rp 773.101.000,00   | 154 buah                                                  | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.08    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah                       | 90%                                      | 90%                                           | Rp 362.600.000,00   | 90%            | Rp 362.600.000,00   | 90%                                                       |                                              |        |
|        |         | 5 02 1 2.08 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                                  | -                                        | -                                             | Rp -                | -              | Rp -                | -                                                         | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 1 2.08 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                      | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan         | 36 laporan                               | 36 laporan                                    | Rp 240.000.000,00   | 36 laporan     | Rp 240.000.000,00   | 36 laporan                                                | Sekretariat                                  | BPKAD  |

| Tujuan                                                    | Sasaran                                           | KODE           | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                              | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                 | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |            |                       | Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|                                                           |                                                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                          | Tahun 2025                                    |                       | Tahun 2026 |                       |                                                           |                                              |        |
|                                                           |                                                   |                |                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                          | Target                                        | Rp.                   | Target     | Rp.                   |                                                           |                                              |        |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.08 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                           | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                                  | 12 laporan                               | 12 laporan                                    | Rp 122.600.000,00     | 12 laporan | Rp 122.600.000,00     | 12 laporan                                                | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.09    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                           | Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah                  | 90%                                      | 90%                                           | Rp 121.250.000,00     | 90%        | Rp 121.250.000,00     | 90%                                                       |                                              |        |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.09 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan              | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya                | 1 unit                                   | 1 unit                                        | Rp 23.000.000,00      | 1 unit     | Rp 23.000.000,00      | 1 unit                                                    | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.09 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya                | 22 unit                                  | 22 unit                                       | Rp 42.000.000,00      | 22 unit    | Rp 42.000.000,00      | 22 unit                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.09 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                                    | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                              | 1 gedung                                 | 1 gedung                                      | Rp 5.000.000,00       | 1 gedung   | Rp 5.000.000,00       | 1 gedung                                                  | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.09 10 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                              | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                        | 53 unit                                  | 53 unit                                       | Rp 21.500.000,00      | 53 unit    | Rp 21.500.000,00      | 53 unit                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 1 2.09 11 | Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              | 30 unit                                  | 30 unit                                       | Rp 29.750.000,00      | 30 unit    | Rp 29.750.000,00      | 30 unit                                                   | Sekretariat                                  | BPKAD  |
| Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah |                |                                                                                                                                 | Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah                                              | 100%                                     | 100%                                          |                       | 100%       |                       | 100%                                                      |                                              |        |
|                                                           |                                                   | 5 02 2         | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                                                                             | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan | 100%                                     | 100%                                          | Rp 149.166.498.740,00 | 100%       | Rp 149.666.498.740,00 | 100%                                                      |                                              |        |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01    | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                                               | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran daerah                                                         | 100%                                     | 100%                                          | Rp 2.391.555.600,00   | 100%       | Rp 2.391.555.600,00   | 100%                                                      |                                              |        |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 01 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                              | 2 dokumen                                | 2 dokumen                                     | Rp 278.745.300,00     | 2 dokumen  | Rp 278.745.300,00     | 2 dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                      | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                          | 2 dokumen                                | 2 dokumen                                     | Rp 215.352.000,00     | 2 dokumen  | Rp 215.352.000,00     | 2 dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 03 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                     | 31 Dokumen                               | 31 Dokumen                                    | Rp 166.063.850,00     | 31 Dokumen | Rp 166.063.850,00     | 31 Dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 04 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                           | 31 Dokumen                               | 31 Dokumen                                    | Rp 185.756.150,00     | 31 Dokumen | Rp 185.756.150,00     | 31 Dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 05 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                    | 31 Dokumen                               | 31 Dokumen                                    | Rp 83.475.000,00      | 31 Dokumen | Rp 83.475.000,00      | 31 Dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 06 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD                                                                        | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                           | 31 Dokumen                               | 31 Dokumen                                    | Rp 98.600.000,00      | 31 Dokumen | Rp 98.600.000,00      | 31 Dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 07 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                              | 2 dokumen                                | 2 dokumen                                     | Rp 604.782.660,00     | 2 dokumen  | Rp 604.782.660,00     | 2 dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|                                                           |                                                   | 5 02 2 2.01 08 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD          | 2 dokumen                                | 2 dokumen                                     | Rp 538.590.640,00     | 2 dokumen  | Rp 538.590.640,00     | 2 dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |

| Tujuan | Sasaran | KODE           | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                         | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                     |             |                     | Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | Tahun 2025                                    |                     | Tahun 2026  |                     |                                                           |                                              |        |
|        |         |                |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          | Target                                        | Rp.                 | Target      | Rp.                 |                                                           |                                              |        |
|        |         | 5 02 2 2.01 09 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 Dokumen                                | 4 Dokumen                                     | Rp 220.190.000,00   | 4 Dokumen   | Rp 220.190.000,00   | 4 Dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02    | Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah                                                                                                                                           | Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100%                                     | 100%                                          | Rp 688.484.990,00   | 100%        | Rp 688.484.990,00   | 100%                                                      |                                              |        |
|        |         | 5 02 2 2.02 01 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 264 dokumen                              | 264 dokumen                                   | Rp 24.200.000,00    | 264 dokumen | Rp 24.200.000,00    | 264 dokumen                                               | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 03 | Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 860 dokumen                              | 860 dokumen                                   | Rp 33.275.000,00    | 860 dokumen | Rp 33.275.000,00    | 860 dokumen                                               | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 05 | Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                              | 7 dokumen                                | 7 dokumen                                     | Rp 78.650.000,00    | 7 dokumen   | Rp 78.650.000,00    | 7 dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 06 | Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank                                                          | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | 12 dokumen                               | 12 dokumen                                    | Rp 47.789.990,00    | 12 dokumen  | Rp 47.789.990,00    | 12 dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | 2 laporan                                | 2 laporan                                     | Rp 203.280.000,00   | 2 laporan   | Rp 203.280.000,00   | 2 laporan                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 09 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | 12 dokumen                               | 12 dokumen                                    | Rp 227.480.000,00   | 12 dokumen  | Rp 227.480.000,00   | 12 dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 10 | Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | 20 dokumen                               | 20 dokumen                                    | Rp 40.535.000,00    | 20 dokumen  | Rp 40.535.000,00    | 20 dokumen                                                | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.02 11 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 31 orang                                 | 31 orang                                      | Rp 33.275.000,00    | 31 orang    | Rp 33.275.000,00    | 31 orang                                                  | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03    | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah                                                                                                                         | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100%                                     | 100%                                          | Rp 1.130.000.000,00 | 100%        | Rp 1.130.000.000,00 | 100%                                                      |                                              |        |
|        |         | 5 02 2 2.03 01 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 372 laporan                              | 372 laporan                                   | Rp 40.000.000,00    | 372 laporan | Rp 40.000.000,00    | 372 laporan                                               | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 02 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                             | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                          | 124 dokumen                              | 124 dokumen                                   | Rp 215.000.000,00   | 124 dokumen | Rp 215.000.000,00   | 124 dokumen                                               | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 03 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                       | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 laporan                                | 1 laporan                                     | Rp 40.000.000,00    | 1 laporan   | Rp 40.000.000,00    | 1 laporan                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |

| Tujuan | Sasaran | KODE           | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                    | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                                                                                    | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                       |            |                       | Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                          | Tahun 2025                                    |                       | Tahun 2026 |                       |                                                           |                                              |        |
|        |         |                |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                          |                                          | Target                                        | Rp.                   | Target     | Rp.                   |                                                           |                                              |        |
|        |         | 5 02 2 2.03 04 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                            | 2 laporan                                | 2 laporan                                     | Rp 290.000.000,00     | 2 laporan  | Rp 290.000.000,00     | 2 laporan                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 05 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | 4 dokumen                                | 4 dokumen                                     | Rp 250.000.000,00     | 4 dokumen  | Rp 250.000.000,00     | 4 dokumen                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 06 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                  | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                 | 1 dokumen                                | 1 dokumen                                     | Rp 40.000.000,00      | 1 dokumen  | Rp 40.000.000,00      | 1 dokumen                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 08 | Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                | 1 dokumen                                | 1 dokumen                                     | Rp 40.000.000,00      | 1 dokumen  | Rp 40.000.000,00      | 1 dokumen                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 09 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | 2 dokumen                                | 2 dokumen                                     | Rp 75.000.000,00      | 2 dokumen  | Rp 75.000.000,00      | 2 dokumen                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 10 | Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | 1 dokumen                                | 1 dokumen                                     | Rp 50.000.000,00      | 1 dokumen  | Rp 50.000.000,00      | 1 dokumen                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 11 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | 31 orang                                 | 31 orang                                      | Rp 50.000.000,00      | 31 orang   | Rp 50.000.000,00      | 31 orang                                                  | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.03 12 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                    | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                                                                   | 1 lembaga                                | 1 lembaga                                     | Rp 40.000.000,00      | 1 lembaga  | Rp 40.000.000,00      | 1 lembaga                                                 | Bidang Akuntansi                             | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.04    | Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                                                                                                               | Persentase Realiasi pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak                                                                                                           | 100%                                     | 100%                                          | Rp 144.458.458.150,00 | 100%       | Rp 144.958.458.150,00 | 100%                                                      |                                              |        |
|        |         | 5 02 2 2.04 08 | Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                | 1 laporan                                | 1 laporan                                     | Rp 130.000.000.000,00 | 1 laporan  | Rp 130.000.000.000,00 | 1 laporan                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.04 09 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               | 1 laporan                                | 1 laporan                                     | Rp 7.000.000.000,00   | 1 laporan  | Rp 7.500.000.000,00   | 1 laporan                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.04 10 | Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | 1 laporan                                | 1 laporan                                     | Rp 7.458.458.150,00   | 1 laporan  | Rp 7.458.458.150,00   | 1 laporan                                                 | Sekretariat                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 2 2.05    | Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah                                                                                                                              | Persentase realisasi capaian pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah                                                                                                                         | 100%                                     | 100%                                          | Rp 498.000.000,00     | 100%       | Rp 498.000.000,00     | 100%                                                      |                                              |        |
|        |         | 5 02 2 2.05 2  | Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                             | 1 dokumen                                | 1 dokumen                                     | Rp 498.000.000,00     | 1 dokumen  | Rp 498.000.000,00     | 1 dokumen                                                 | Bidang Anggaran dan Penatausahaan            | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03        | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                                                                                                                                                                               | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah sesuai ketentuan                                                                                                                       | 100%                                     | 100%                                          | Rp 3.530.847.668,00   | 100%       | Rp 3.530.847.668,00   | 100%                                                      |                                              |        |
|        |         | 5 02 03 2.01   | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                                                                                       | Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan, Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan                                            | 100%                                     | 100%                                          | Rp 3.530.847.668,00   | 100%       | Rp 3.530.847.668,00   | 100%                                                      |                                              |        |

| Tujuan | Sasaran | KODE            | Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                       | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |                   |            |                   | Kondisi Kerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah | Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------|
|        |         |                 |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                          | Tahun 2025                                    |                   | Tahun 2026 |                   |                                                           |                                              |        |
|        |         |                 |                                                                                                        |                                                                                                                             |                                          | Target                                        | Rp.               | Target     | Rp.               |                                                           |                                              |        |
|        |         | 5 02 03 2.01 01 | Penyusunan Standar Harga                                                                               | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                           | 1 dokumen                                | 1 dokumen                                     | Rp 271.998.725,00 | 1 dokumen  | Rp 271.998.725,00 | 1 dokumen                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 02 | Koordinasi dan Penyusunan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                | 1 dokumen                                | 1 dokumen                                     | Rp 146.762.795,00 | 1 dokumen  | Rp 146.762.795,00 | 1 dokumen                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 03 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                | 5 dokumen                                | 5 dokumen                                     | Rp 146.762.795,00 | 5 dokumen  | Rp 146.762.795,00 | 5 dokumen                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 04 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                   | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                            | 4 dokumen                                | 4 dokumen                                     | Rp 273.937.725,00 | 4 dokumen  | Rp 273.937.725,00 | 4 dokumen                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 05 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                            | 1 laporan                                | 1 laporan                                     | Rp 588.662.875,00 | 1 laporan  | Rp 588.662.875,00 | 1 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 06 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                      | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah                                                                | 2 laporan                                | 2 laporan                                     | Rp 824.812.093,00 | 2 laporan  | Rp 824.812.093,00 | 2 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 07 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                         | 3 laporan                                | 3 laporan                                     | Rp 185.000.000,00 | 3 laporan  | Rp 185.000.000,00 | 3 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 08 | Penilaian Barang Milik Daerah                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                       | 2 laporan                                | 2 laporan                                     | Rp 274.895.000,00 | 2 laporan  | Rp 274.895.000,00 | 2 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 09 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang                                                         | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah                                            | 5 laporan                                | 5 laporan                                     | Rp 165.575.000,00 | 5 laporan  | Rp 165.575.000,00 | 5 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 10 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | 10 dokumen                               | 10 dokumen                                    | Rp 135.000.000,00 | 10 dokumen | Rp 135.000.000,00 | 10 dokumen                                                | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 11 | Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang milik Daerah                                       | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                       | 2 laporan                                | 2 laporan                                     | Rp 100.322.150,00 | 2 laporan  | Rp 100.322.150,00 | 2 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 12 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                 | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                             | 1 laporan                                | 1 laporan                                     | Rp 155.749.300,00 | 1 laporan  | Rp 155.749.300,00 | 1 laporan                                                 | Bidang Aset                                  | BPKAD  |
|        |         | 5 02 03 2.01 13 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                             | 31 orang                                 | 31 orang                                      | Rp 261.369.210,00 | 31 orang   | Rp 261.369.210,00 | 31 orang                                                  | Bidang Aset                                  | BPKAD  |

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mengetahui tingkat pencapaian kinerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah 2 (dua) tahun mendatang perlu ditetapkan indikator kinerja perangkat daerah. Indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai perangkat daerah dalam dua tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJPD Tahun 2025-2026. Tingkat keberhasilan pencapaian tersebut sangat didukung oleh profesionalitas seluruh jajaran organisasi, karena profesionalitas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan faktor kunci yang dapat memajukan organisasi sehingga bisa bergerak lebih cepat untuk menuju keberhasilan dalam merealisasikan program-program pembangunan yang diamanatkan untuk dilaksanakan selama 2 (dua) tahun kedepan, sesuai pula dengan tugas dari perangkat daerah ini membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan.

Adapun indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah 2025 - 2026 dapat dilihat pada **Tabel 7.1.** berikut ini :

**Tabel. 7.1**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU)**  
**BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026**

| No | Sasaran                                           | Indikator Kinerja                                                             | Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Sumber Data | Cara Menghitung Indikator                                                                                                                                                                                                                                                                               | Unit Bertanggung Jawab            | Penanggungjawab Data              |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1  | Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah | 1 Persentase Ketepatan Waktu Penetapan APBD                                   | Ketepatan waktu penetapan APBD adalah Ketepatan waktu penetapan APBD sebelum batas waktu yang ditetapkan yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya                                                                                                                                                                                 | BPKAD       | Jika APBD ditetapkan sebelum batas waktu yang ditentukan yaitu paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya maka sama dengan 100%                                                                                                                                                        | Bidang Anggaran dan Penatausahaan | Bidang Anggaran dan Penatausahaan |
|    |                                                   | 2 Persentase Penerbitan SP2D Tepat Waktu                                      | Penerbitan SPS2D tepat waktu adalah Penerbitan surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana lewat bank yang dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar                                                                                                                                                     | BPKAD       | Jika penerbitan SP2D dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya SPM secara lengkap dan benar maka sama dengan 100%                                                                                                                                                                    | Bidang Anggaran dan Penatausahaan | Bidang Anggaran dan Penatausahaan |
|    |                                                   | 3 Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah | Persentase Kesesuaian dan Ketepatan Waktu Penyajian Laporan Keuangan Daerah adalah Laporan keuangan daerah yang disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta penyampaian LKD kepada BPK tidak melebihi waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir | BPKAD       | Jika LKD disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) serta penyampaian LKD kepada BPK tidak melebihi waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka sama dengan 100% | Bidang Akuntansi                  | Bidang Akuntansi                  |

| No | Sasaran | Indikator Kinerja                                             | Deskripsi                                                                                                                            | Sumber Data | Cara Menghitung Indikator                                                                                                                                                                   | Unit Bertanggung Jawab | Penanggungjawab Data |
|----|---------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|
|    |         | 4 Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam aplikasi | Persentase Aset Daerah yang Terinventarisasi dalam aplikasi adalah Telah terinventarisasinya seluruh asst daerah dalam satu aplikasi | BPKAD       | Jika seluruh asset daerah sudah terinventarisasi dalam satu aplikasi, maka sama dengan 100%.<br>Rumus : (seluruh asset yang terinventarisasi dibagi total asset yang dimiliki dikalli 100%) | Bidang Aset            | Bidang Aset          |

(sumber data : IKU BPKAD Kab.Mempawah)

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indicator* Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah dapat lihat pada **tabel 7.2** sebagai berikut :

**Tabel. 7.2**  
**Indikator Kinerja Kunci (IKK)**  
**BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026**

| No | Indikator                                     | Satuan | Target Capaian Setiap Tahun |      | Target Akhir Renstra |
|----|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------|------|----------------------|
|    |                                               |        | 2025                        | 2026 |                      |
| 1  | Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah | Opini  | WTP                         | WTP  | WTP                  |

(Sumber data : LPPD/IKK BPKAD Kab.Mempawah)

**Tabel. 7.3**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Periode 2025 - 2026**

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                     | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| Meningkatnya Pelayanan Prima kepada Publik                                               |                                                                                                               | Indeks Kepuasan Masyarakat                                                                                                                                                   | Predikat                                       | B          | BB                             | BB            | BB                                           |
| Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat                                                  |                                                                                                               | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Perangkat Daerah                                                                                                                       | Predikat                                       | B          | BB                             | BB            | BB                                           |
| <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN<br/>PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                   | Meningkatnya kualitas pelayanan kesekretariatan                                                               | Tingkat kepuasan Bidang terhadap pelayanan kesekretariatan                                                                                                                   | Nilai                                          | 95         | 95                             | 95            | 95                                           |
| Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja<br>Perangkat Daerah                       | Meningkatnya kualitas Perencanaan,<br>Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat<br>Daerah                   | Persentase tingkat pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi<br>Kinerja                                                                                             | Persen                                         | 100        | 100                            | 100           | 100                                          |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                       | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                                  | Dokumen                                        | 2          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                               | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen RKA-SKPD                                               | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                                                                          | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD                                  | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                     | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                                                      | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                       | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan DPA-<br>SKPD                                                      | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                                                                                          | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                             | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan<br>Perubahan DPA-SKPD                                             | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD                                                                      | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan<br>Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan<br>Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD | Dokumen                                        | 3          | 3                              | 3             | 3                                            |
| <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                            | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</b>                           | <b>Persentase tingkat pelaksanaan administrasi keuangan</b>                                                                                                                  | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                        | Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                            | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                            | Orang/Bulan                                    | 49         | 49                             | 49            | 49                                           |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi<br>Keuangan SKPD                      | Terlaksananya Penatausahaan dan<br>Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                         | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                                                                                                          | Dokumen                                        | 12         | 12                             | 12            | 12                                           |

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                          | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                       | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                          | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                    | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                   | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                 | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Tersedianya bahan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| <b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>                 | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b> | <b>Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi barang milik daerah</b>                                                                 | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                   | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD                                       | Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD                                                                                         | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                              | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>              | <b>Persentase tingkat pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian</b>                                                                         | <b>Persen</b>                                  | <b>95</b>  | <b>95</b>                      | <b>95</b>     | <b>95</b>                                    |
| Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                        | Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya                                        | Jumlah paket pakaian dinas beserta atributnya                                                                                                      | Paket                                          | 49         | 49                             | 49            | 49                                           |
| Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                      | Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan                                          | Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan                                                                               | Orang                                          | 10         | 10                             | 10            | 10                                           |
| <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                     | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi umum Perangkat Daerah</b>                     | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum</b>                                                                                            | <b>Persen</b>                                  | <b>90</b>  | <b>95</b>                      | <b>95</b>     | <b>95</b>                                    |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor              | Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor                               | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan                                                                 | Paket                                          | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                  | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                                   | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                     | Paket                                          | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                              | Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                                               | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                 | Paket                                          | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                                       | Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                                        | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                          | Paket                                          | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyediaan Bahan/Material                                                     | Tersedianya Bahan/Material                                                                      | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                        | Paket                                          | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                          | Terlaksananya penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                                                                | Laporan                                        | 10         | 10                             | 10            | 10                                           |
| Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                         | Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                             | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                                                                               | Dokumen                                        | 4500       | 4500                           | 4500          | 4500                                         |
| <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>       | <b>Terlaksananya proses pengadaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku</b>         | <b>Persentase pemenuhan pengadaan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>                                             | <b>Persen</b>                                  | <b>80</b>  | <b>80</b>                      | <b>80</b>     | <b>80</b>                                    |

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                               | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                           | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                   | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                                                                                                     |                                                                                                             | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                                | Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                                                               | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan                                       | Unit                                           | 3          | 3                              | 3             | 3                                            |
| Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                              | Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                             | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                                     | Unit                                           | -          | -                              | -             | -                                            |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                 | Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                                | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                        | Unit                                           | -          | -                              | -             | -                                            |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                       | Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                      | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan              | Unit                                           | 154        | 154                            | 154           | 154                                          |
| <b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                                        | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>                             | <b>Persen</b>                                  | <b>90</b>  | <b>95</b>                      | <b>95</b>     | <b>95</b>                                    |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                      | Laporan                                        | 36         | 36                             | 36            | 36                                           |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                        | Laporan                                        | 12         | 12                             | 12            | 12                                           |
| <b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                       | <b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                                      | <b>Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b> | <b>Persen</b>                                  | <b>90</b>  | <b>90</b>                      | <b>90</b>     | <b>90</b>                                    |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya      | Unit                                           | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya      | Unit                                           | 22         | 22                             | 22            | 22                                           |
| Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                       | Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                    | Unit                                           | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                                 | Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya                   | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi              | Unit                                           | 53         | 53                             | 53            | 53                                           |
| Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya                       | Terlaksananya Pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya         | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi    | Unit                                           | 30         | 30                             | 30            | 30                                           |
| <b>Meningkatnya Penguatan Birokrasi yang efektif dan Efisien</b>                                                   |                                                                                                                     | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                                                                           | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                            | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                           | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                 |                                                                                                                      |                                                                                                                     | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah                                                                               |                                                                                                                      | Persentase Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Pengelolaan Keuangan Daerah                                            | Persen                                         | 100        | 100                            | 100           | 100                                          |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>                                                                                      | Meningkatnya Kualitas Penyusunan Anggaran, Pelayanan Keperbendaharaan dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai ketentuan | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran, perbendaharaan dan laporan keuangan daerah sesuai ketentuan | Persen                                         | 100        | 100                            | 100           | 100                                          |
| <b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>                                                                        | Meningkatnya kualitas Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                                                             | Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen anggaran daerah                                                       | Persen                                         | 100        | 100                            | 100           | 100                                          |
| Koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS                                                                                          | Tersusunnya KUA dan PPAS                                                                                             | Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun                                                                            | Dokumen                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Koordinasi dan penyusunan perubahan KUA dan PPAS                                                                                | Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                                                                         | Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun                                                        | Dokumen                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi RKA-SKPD                                                                                  | Terlaksananya verifikasi RKA-SKPD                                                                                    | Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                                   | Dokumen                                        | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan RKA-SKPD                                                                        | Terlaksananya verifikasi perubahan RKA-SKPD                                                                          | Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi                                                                         | Dokumen                                        | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA-SKPD                                                                                  | Terlaksananya verifikasi DPA-SKPD                                                                                    | Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi                                                                                  | Dokumen                                        | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |
| Koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD                                                                        | Terlaksananya verifikasi perubahan DPA-SKPD                                                                          | Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi                                                                         | Dokumen                                        | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |
| Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD                     | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                        | Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                            | Dokumen                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran perubahan APBD | Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD    | Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD        | Dokumen                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran                                                                     | Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                                 | Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran                                                             | Dokumen                                        | 4          | 4                              | 4             | 4                                            |
| <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                                         | <b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>                                                       | <b>Persentase ketepatan waktu penerbitan SP2D</b>                                                                   | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                                                           | Tersedianya bahan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah                                                          | Dokumen                                        | 264        | 264                            | 264           | 264                                          |
| Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                                         | Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                               | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD                                               | Dokumen                                        | 860        | 860                            | 860           | 860                                          |

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                       | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                  | Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya                                                                                                                                                                                                                               | Dokumen                                        | 7          | 7                              | 7             | 7                                            |
| Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan Bank                                                          | Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumen                                        | 12         | 12                             | 12            | 12                                           |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) | Laporan                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait                                                                                                                                                                                                                                                       | Dokumen                                        | 12         | 12                             | 12            | 12                                           |
| Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                              | Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                           | Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan                                                                                                                                                                                                                                     | Dokumen                                        | 20         | 20                             | 20            | 20                                           |
| Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Orang                                          | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |
| <b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                  | <b>Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                         | <b>Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen pelaporan keuangan daerah</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                     | Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                     | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Laporan                                        | 372        | 372                            | 372           | 372                                          |
| Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban                                                                             | Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                            | Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban                                                                                                                                                                                                                                                          | Dokumen                                        | 124        | 124                            | 124           | 124                                          |
| Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                       | Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                               | Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                             | Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                             | Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Laporan                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                  | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                                                     | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                                                | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota | Dokumen                                        | 4          | 4                              | 4             | 4                                            |
| Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                  | Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                         | Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                 | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                                       | Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD                                                                                                                                | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                                       | Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah                                                                                                              | Dokumen                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                                     | Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah                                                                                                                            | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                                       | Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                                                 | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                                              | Orang                                          | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |
| Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                    | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                                                                                                                                              | Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina                                                                                                                                                                   | Lembaga                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| <b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>                                                                                                                                                        | <b>Meningkatnya kualitas pengelolaan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak</b>                                                                                                     | <b>Persentase Realiasi pencairan dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak</b>                                                                                                    | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                                                  | Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan                                                                                                                                | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                                 | Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                                                                                                                                               | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                            | Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota                                                                                                                                          | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| <b>Pengelolaan Data Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah</b>                                                                                                                       | <b>Meningkatnya kualitas Pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                              | <b>Persentase realisasi capaian pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah</b>                                                                                                                  | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah                                                                                                                               | Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah                                                                                             | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |

| Tujuan, Sasaran, Program/<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                         | Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                   | Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran / Program /<br>Kegiatan / Sub Kegiatan                                                                                                    | Data Capaian pada<br>Tahun Awal<br>Perencanaan |            | Target Capaian Setiap<br>Tahun |               | Kondisi Kerja<br>pada Akhir<br>Periode RPJPD |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                                                                                              | Satuan                                         | Target     | Tahun<br>2025                  | Tahun<br>2026 |                                              |
| <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK<br/>DAERAH</b>                                                           | <b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik<br/>Daerah sesuai ketentuan</b>                                           | <b>Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen barang milik daerah<br/>sesuai ketentuan</b>                                                                                | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| <b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>                                                                       | <b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Barang Milik<br/>Daerah sesuai ketentuan</b>                                           | <b>Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Penatausahaan,<br/>Penggunaan , Pemanfaatan, Pengamanan, Pemindahtanganan dan<br/>Penghapusan BMD yang sesuai ketentuan</b> | <b>Persen</b>                                  | <b>100</b> | <b>100</b>                     | <b>100</b>    | <b>100</b>                                   |
| Penyusunan Standar Satuan Harga                                                                              | Tersedianya Satuan Harga                                                                                                    | Jumlah Standar Harga yang Disusun                                                                                                                                            | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar<br>Kebutuhan Barang Milik Daerah                          | Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar<br>Kebutuhan Barang Milik Daerah                                        | Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                 | Dokumen                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik<br>Daerah                                                      | Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                           | Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah                                                                                                                                 | Dokumen                                        | 5          | 5                              | 5             | 5                                            |
| Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                      | Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                                    | Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                                                                                             | Dokumen                                        | 4          | 4                              | 4             | 4                                            |
| Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                            | Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah<br>,                                                                        | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah                                                                                                                             | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                            | Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah                                                                             | Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang<br>Milik Daerah                                                                                                              | Laporan                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                               | Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah                                                                                                                          | Laporan                                        | 3          | 3                              | 3             | 3                                            |
| Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                | Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah                                                                                 | Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik<br>Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah                                                                     | Laporan                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang                                                               | Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian<br>Pengelolaan Barang Milik Daerah                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah                                                                                          | Laporan                                        | 5          | 5                              | 5             | 5                                            |
| Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan,<br>Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan<br>Barang Milik Daerah | Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan, Pemindahtanganan,<br>Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan,<br>Pemanfaatan,Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik<br>Daerah                                            | Dokumen                                        | 10         | 10                             | 10            | 10                                           |
| Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang<br>milik Daerah                                          | Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan<br>Laporan Barang Milik                                                  | Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik<br>Daerah                                                                                     | Laporan                                        | 2          | 2                              | 2             | 2                                            |
| Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                                                                       | Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah                                                                                     | Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun                                                                                                                              | Laporan                                        | 1          | 1                              | 1             | 1                                            |
| Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                       | Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik<br>Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah<br>Pemerintah Kabupaten/Kota                                                                           | Orang                                          | 31         | 31                             | 31            | 31                                           |

## **BAB VIII**

### **P E N U T U P**

Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2025-2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 2 (dua) tahun dan menjadi salah satu keharusan dalam sistem saat ini yang secara konseptual merupakan pedoman perencanaan dan memberikan arah bagi penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra BPKAD Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2025-2026 yang dituangkan dalam tujuan, sasaran, strategis, arah kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan kerangka pendanaan indikatif.

Tujuan dan sasaran dalam dokumen Renstra ini dapat tercapai apabila terdapat komitmen dan seluruh komponen untuk bersama mewujudkan secara transparan, profesional dan bertanggung jawab serta menjaga konsistensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan.

Akhir kata semoga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Mempawah ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *Good Governance*.

Mempawah, 28 Februari 2024

Kepala Badan Pengelola Keuangan  
Dan Aset Daerah



Dra. INAWATI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19720510 199203 2 009